

**SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**AHMAD HABIBI
NIM. 160401063
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
1442H / 2020M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunkiasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

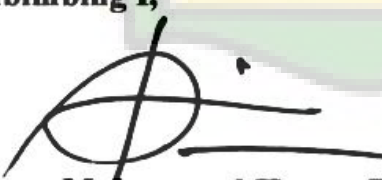
Oleh

**AHMAD HABIBI
NIM. 160401063**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ridwan Muhammad Hasan, Ph. D
NIP. 197104132005011002


Rusnawati, S. Pd., M. Si
NIP. 197703092009122003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Komunikasi
dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

AHMAD HABIBI
NIM. 160401063

Pada Hari/Tanggal

Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H

di

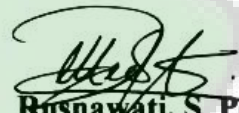
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

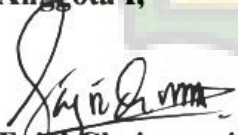
Ketua,


Ridwan Muhammad Hasan, Ph. D
NIP. 197104132005011002

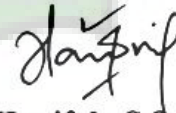
Sekretaris,


Rusnawati, S. Pd., M. Si
NIP. 19770392009122003

Anggota I,


Fajri Chairawati, S.Pd. I, MA
NIP. 197903302003122002

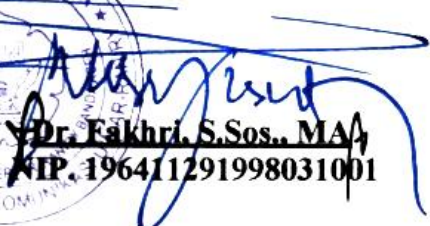
Anggota II,


Hanifah, S.Sos. I, M. Ag
NIP. 199009202019032015

Mengetahui,

 **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**




Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Habibi

NIM : 160401063

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 1 September 2020
Yang Menyatakan,




Ahmad Habibi
NIM. 160401063

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil** dengan waktu yang direncanakan. Shalawat beserta salam tidak lupa kepada sosok yang sungguh luar biasa yang telah membawa perubahan kepada umat di seluruh alam yaitu Baginda Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat berjasa yaitu Ayah tercinta Hanapi Limbong dan Ibu yang ku sayangi Nuriyah Malau yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.
2. Saudara-saudara kandung penulis, Zulfan Hanur Limbong, S.HI, Siti Mulia Hanur Limbong, S.Pd, Anharuddin Hanur Limbong, Ahmad Asdar Hanur Limbong dan Rizkia Mulia Hanur Limbong.

3. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi bapak Dr. Hendra Syahputra, MM.
5. Ibu Anita, S.Ag., M.Hum sebagai Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan sekaligus sebagai Penasehat penulis yang telah memberikan banyak nasehat serta dorongan yang kuat kepada penulis, mulai dari awal sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Pembimbing 1 Bapak Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D dan ibu Rusnawati., S.Pd, M.Si selaku Pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberi bimbingan yang begitu baik dan penuh perhatian kepada penulis, serta tidak tanggung-tanggung telah memberikan ilmunya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat melewati semua kendala-kendala yang ada.
7. Bapak dan ibu Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang membina dan membimbing penulis dari awal masuk kuliah sampai pada saat ini dengan segenap ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
8. Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA dan Dr. Muhajir Al-fairusy, MA, yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

9. Abangda Ardiansyah yang banyak sekali membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Abangda Edi Yanto, ML, yang selalu memberikan motivasi dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
11. Marni, S.Sos, yang memberikan ide-ide untuk menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini
12. Kepada sahabat saya, Junaidi, Ali Basa, dan arifni Lingga yang selalu mendorong penulis hingga skripsi ini selesai.
13. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat menuliskan satu persatu, dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa KPI angkatan 2016.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu penulisan skripsi ini. Semoga Allah yang nantinya membalas semua kebaikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan nya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 1 September 2020
Penulis,

Ahmad Habibi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Komunikasi	16
1. Pengertian Komunikasi	16
2. Komunikasi Persuasi	19
3. Elemen Komunikasi	20
C. Sosialisasi.....	22
1. Pengertian Sosialisasi	22
2. Bentuk-Bentuk Sosialisasi	32
3. Tahap Sosialisasi	33
4. Pembentukan Kelompok Sosial	34
D. Implementasi	36
1. Pengertian Implementasi	36
2. Implementasi Kebijakan.....	37
3. Implikasi dan Tahap-Tahap Implementasi	38
4. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan	39
5. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	41
E. Program Keluarga Harapan (PKH)	45
1. Pengertian Program Keluarga Harapan	45
2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	48
3. Kriteria Komponen Penerima PKH.....	49

4. Hak dan Kewajiban Peserta KPM PKH	49
5. Mekanisme Penerimaan PKH	51
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	60
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	62
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	70
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	79
1. Sosialisasi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan...	77
2. Implementasi Program PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

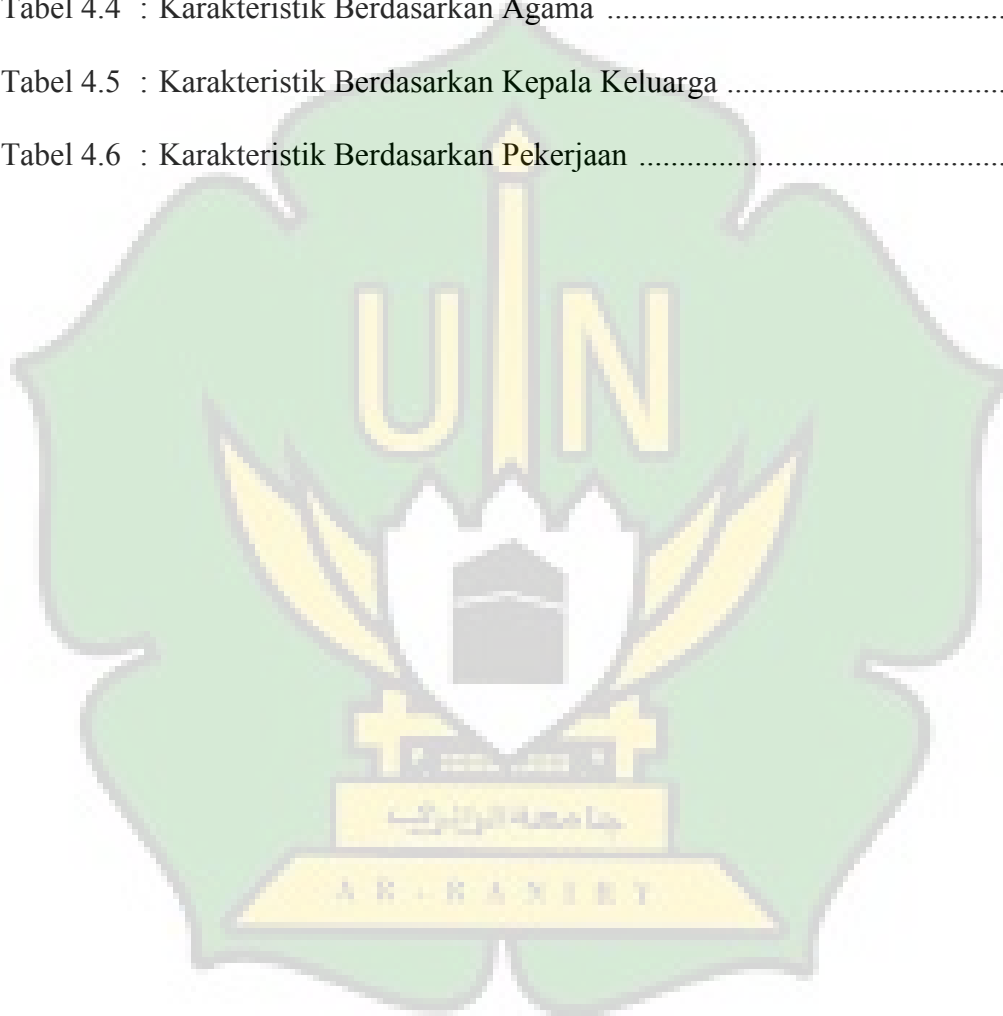
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kewajiban anggota Keluarga Penerima Manfaat (PKH) berdasarkan kriteria komponen	51
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Karakteristik Berdasarkan Kelompok Umur	73
Tabel 4.2 : Karakteristik Berdasarkan Mata Pencaharian.....	74
Tabel 4.3 : Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
Tabel 4.4 : Karakteristik Berdasarkan Agama	76
Tabel 4.5 : Karakteristik Berdasarkan Kepala Keluarga	77
Tabel 4.6 : Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan	78



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil”. Sejak dibentuk tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) yang digerakkan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu program berbasis kebijakan dari Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Salah satu kabupaten di Aceh yang kerap mendapat stereotip tertinggal adalah Kabupaten Aceh Singkil. Kasus kemiskinan di Singkil juga masih tergolong tinggi, terutama di Kecamatan Gunung Meriah sebagai kecamatan paling padat penduduknya. Melalui Dinas Sosial setempat, PKH ikut hadir di Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Karena itu, studi ini berupaya untuk melihat lebih jauh bagaimana bentuk sosialisasi dan implementasi PKH yang dijalankan di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti akan berfokus pada Kecamatan Gunung Meriah dalam rangka mengumpulkan data program PKH. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti terlibat dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan wawancara dengan pihak kecamatan, pelaksana program PKH, dan masyarakat setempat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, PKH di Kecamatan Gunung Meriah sudah dilaksanakan selama 6 tahun sejak tahun 2014, dimulai dengan sosialisasi dan dilanjutkan implementasi di lapangan. Sejauh ini, program PKH di Kecamatan Gunung Meriah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa kendala di lapangan yang peneliti temui, diantaranya data yang masih amburadul terhadap keluarga penerima dampak program PKH, selain itu, dari hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya pendamping PKH di Kecamatan Gunung Meriah menggraduasi peserta PKH yang sudah sejahtera dalam list penerima program PKH. Karena itu, kedepan dibutuhkan pendampingan dan evaluasi dari pelaksana program untuk membantu program PKH di Kecamatan Gunung Meriah lebih tepat sasaran dan dapat menjadi salah satu program andalan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Singkil.

Kata kunci: *Sosialisasi, Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH).*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar.

Allah SWT berfirman di dalam Surah Ar-Rum ayat 38,

فَاتِّذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikan haknya kepada kerabat dekat, juga orang-orang miskin dan orang yang sedang perjalanan. Itulah yang lebih baik Bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah SWT. Dan mereka itulah yang beruntung”.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal, banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan, dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas.¹

Konsep kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang dimana mereka tidak

¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 299.

memiliki kecukupan sumber data untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Defenisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha.² Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, India, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia maupun Hongaria. Semua negara bersepakat bahwa kemiskinan merupakan problem kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus bisa ditanggulangi.³

Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dapat dibagi tiga, yaitu:

Pertama, faktor internal manusia, yaitu faktor yang muncul dari manusia itu sendiri, seperti: lemahnya etos kerja yang terlihat dalam sikap malas, kerja tidak teratur dan tidak bergairah. Faktor-faktor ini kemudian melemahkan tingkat

² Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembanguna Syari'ah, Edisi Revisi*, (Jakarta : PT: Grafindo persada, 2016), hal. 70.

³ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universitas Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 14.

produktivitas seseorang, yang mengakibatkan rendahnya status sosial ekonominya di tengah masyarakat.

Kedua, kemiskinan bisa terjadi disebabkan non-individual seperti penyelenggara pemerintah yang korupsi dan sejenisnya, yang menyalahgunakan daya dan tenaga rakyat untuk kebobrokan birokrasi yang merugikan. Kemiskinan ini juga sering dikaitkan dengan sistem ekonomi yang berorientasi kapitalis yang menguntungkan para pemilik modal saja. Sebab dalam sistem semacam ini rakyat akan banyak didominasi dan dieksploitasi.

Ketiga, visi teologi yang represif. Faktor ini terlihat berkembang luas di tengah masyarakat beragama, yaitu adanya kecenderungan sebagai umat beragama memperlakukan kemiskinan sebagai suatu yang telah menjadi suratan takdir dan kepastian yang datang dari Tuhan.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak terjadinya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh

empat faktor yaitu: faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan faktor struktural.⁴

Kemiskinan juga mengakibatkan seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mengakses, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar wilayah daerah tinggalnya, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Program pengentasan kemiskinan selama ini terkadang hanya berupa bantuan yang bersifat kontemporer saja yang justru menimbulkan ketergantungan dan bukan pada proses pemberdayaan yang diarahkan pada penggalian, pemanfaatan dan optimalisasi kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat serta pemberian kekuasaan kepada masyarakat miskin.

Khusus dalam konteks Kabupaten Aceh Singkil, studi mengenai potret kemiskinan di sana, pernah dikaji oleh Muhajir Al-Fairusy. Dari penjelasan studi yang dilakukan Muhajir Al-Fairusy, memasukkan kawasan Gunung Meriah sebagai salah satu kecamatan miskin di Aceh Singkil, mengingat jumlah penduduk di kecamatan ini paling banyak secara statistik. Muhajir Al-Fairusy dalam studi kemiskinan di Aceh Singkil lewat pendekatan struktural dan kultural menyebut jika kemiskinan di Singkil memang amat dipengaruhi oleh kondisi struktural, dengan beberapa alasan yang dijabarkannya. Seperti, belum maksimalnya peran pemerintah dan bantuan yang masih belum tepat sasaran.⁵

Pengembangan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam membangun pada awal perkembangan, seringkali dipertentangkan dengan pembangunan

⁴ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universitas Bidang Kesehatan...*, hal. 17-18.

⁵ Muhajir Al-Fairusy, *Kehidupan Sekeruh Air di Ladang Sawit: Kajian Kemiskinan Masyarakat Perbatasan, Kabupaten Aceh Singkil*, Community: Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015, hal. 97-110.

ekonomi. Hal ini terkait pemahaman orang banyak yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya industrialisasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembangunan yang terlalu berfokus pada pembangunan ekonomi justru tidak jarang meningkatkan kesenjangan ekonomi antara mereka yang kaya dan miskin. Sehingga ketika pembangunan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang baik, ternyata angka kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin menjadi meningkat.⁶

Di Indonesia, masalah kemiskinan menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat pun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.⁷

Sementara itu, pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan

⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 38.

⁷ Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Mata Rantai Kemiskinan)*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal. 25.

dalam kemampuan kecukupan kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanggulangan masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah kemiskinan.

Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).⁸

Pada tahun 2007, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk program keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk oleh Menteri Sosial yang mengadopsi program dari luar negeri yang dicoba untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembentukan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Bidikan ke arah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dari keluarga tersebut. Dan bidikan ke arah kesehatan

⁸ Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No 12, hal. 1.

bertujuan agar para anggota keluarga tercukupi gizinya dan tidak terserang gizi buruk.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.⁹

Program tersebut mempunyai tujuan untuk dapat mengurangi beban keluarga miskin dalam hal pendidikan anak, kesehatan balita, dan ibu hamil, serta lansia. PKH juga bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. PKH dapat sebagai program yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, karena program PKH ini mensejahterakan anak, dengan cara mencukupi biaya pendidikan hingga 12 tahun. Jika dahulu orang tua dari anak-anak miskin tersebut adalah tergolong pada orang yang pendidikan kurang atau bahkan tidak mengenyam pendidikan, maka diupayakan anak-anak mereka tidak mendapatkan nasib yang sama dengan orang tuanya. Dalam artian, program PKH ini mensejahterakan keluarga melalui pendidikan anak, karena anak adalah sebagai penerus generasi keluarga, sehingga mencetak generasi yang kompeten dan

⁹ Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, “ *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan*, (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”, (2013) Vol.16, No.2, hal. 81.

unggul, maka harus di didik dengan pendidikan yang layak bagi anak tersebut. Di samping melalui pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH) juga mensejahterakan keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pemberian dana untuk biaya kesehatan balita, ibu hamil, disabilitas dan lansia.

Program Keluarga Harapan (PKH) dialokasikan ke daerah-daerah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Di sini salah satu daerah yang telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, khususnya masalah kemiskinan, maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di kecamatan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial.

Di sini terdapat permasalahan yang timbul pada Program Keluarga Harapan (PKH) yakni banyaknya masyarakat yang dalam secara keekonomiannya mampu akan tetapi mereka terdaftar dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). sebab, masyarakat yang memang di dalam garis kemiskinan tidak terdaftar penerima keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) hal seperti ini masih sering terjadi ketika melakukan verifikasi data. Hal tersebut menyebabkan munculnya tidak valid

menjadikan bantuan dari pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Untuk itu masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi seperti roda empat juga ikut terdaftar sebagai warga miskin. Itulah sebabnya mengapa Program Keluarga Harapan (PKH) Belum berjalan dengan baik sebab masih banyak daerah yang belum terdeteksi valid atau tidak datanya. Maka dari itu masyarakat yang memang berhak atau sudah sepantasnya mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut justru mereka tidak dapat merasakan manfaatnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Sosialisasi Dan Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mensosialisasikan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui cara mensosialisasikan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam permasalahan-permasalahan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan, adat istiadat, bahasa, perilaku, kebiasaan dan sebagainya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sehingga seseorang dapat berfikir, bersikap, dan berperilaku secara serasi, selaras dan seimbang.¹⁰

¹⁰ Wida Widiyanti, *Sosiologi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 54.

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektifitas.¹²

3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.¹³

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 70.

¹² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39.

¹³ Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, “ *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan*, (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”, (2013) Vol.16, No.2, 81.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan/rujukan dari pembahasan yang terkait dengan tema yang diteliti, peneliti berusaha mencari hasil penelitian yang dikaji oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian sedang diteliti, guna dan tujuan peneliti di sini adalah sebagai pembanding dan memperkaya teori karya ilmiah ini sebagai acuan terhadap penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

Penelitian yang berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat” (studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)* oleh Cut Razi Mursandi, penelitian ini ingin mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perlindungan sosial pada masyarakat, penelitian ini ingin mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan penelitian ingin juga mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam mengimplementasikan di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan metode dan pengumpulan data peneliti menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini ingin mensejahterakan masyarakat berupa memberikan biaya kesehatan, pendidikan dan

kesejahteraan sosial. Terutama dalam program ini bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴

Penelitian lain yang berkaitan dengan peneliti dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*” oleh Nurdiana, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Implementasi pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi dan ingin mengetahui bagaimana hambatan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan metode yang digunakan dan teknik pengumpulan data peneliti menunjukkan bahwa Program PKH di Kecamatan Mambi kurangnya sosialisasi dan melibatkan tokoh masyarakat dalam pencairan dana Program PKH. Para pendamping Program PKH tidak ada kontribusi dalam pencairan dana program PKH seperti dalam melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup, sehingga kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrol pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta program PKH.¹⁵

Penelitian lain yang berkaitan dengan peneliti yang berjudul “*Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi*

14

Cut Razi Mirsandi, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya*, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Perkembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Ar-Raniry Banda, 2019).

¹⁵ Nurdiana, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mamasan*, (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Perkembangan Masyarakat Islam (PMI), UIN Alauddin, 2017).

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya” oleh Tri Setiana. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program PKH di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PKH di Gampong Serba Jadi di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan metode yang digunakan dan teknik pengumpulan data peneliti menunjukkan bahwa program PKH di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, menunjukkan bahwa ada kendala-kendala yang didapatkan oleh peneliti dalam pelaksanaan program PKH yaitu antara lain keterlambatan informasi yang diberikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam segi pencairan dana PKH dan verifikasi data.¹⁶

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian ini meneliti tentang “*Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*” agar pendataan dan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan apa yang

¹⁶ Tri Setiana, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, (Meulaboh-Aceh Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, 2014).

diupayakan oleh pemerintahan Republik Indonesia yaitu pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

B. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Secara umum komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan yang disampaikan seseorang (komunikator) kepada lawan bicaranya (komunikan) atau komunikasi dapat dikatakan juga sebagai suatu proses pengoperan pesan dari individu kepada individu lain, dari individu ke suatu kelompok kecil (small group) maupun kelompok besar (large group).

Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta berkaitan satu sama lainnya.¹⁷

Komunikasi adalah inti semua hubungan sosial, apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan atau melenyapkan persengketaan apabila muncul.

Manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial, memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju dan berkembang, maka salah

¹⁷ Yetty Oktarina & Yudi Abdullah, *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017), hal 1-3.

satu sarannya adalah komunikasi. Karenanya, komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan manusia.

Komunikasi memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kontak tertentu atau dengan mempergunakan sesuatu alat. Banyak komunikasi terjadi dan berlangsung tetapi kadang-kadang tidak tercapai kepada sasaran tentang apa yang terkomunikasikan itu. Dimungkinkan adanya komunikasi yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan kalau terjalin persesuaian diantara keduanya. Terlaksananya komunikasi yang baik, yang banyak rintangan yang bersifat fisik, individual, bahasa dan sampai perbedaan arti yang dimaksud oleh orang yang diajak berkomunikasi. Saling pengertian dapat terjadi dengan menggunakan bahasa yang baik sehingga pihak yang menerima dapat mengerti apa yang diberikan atau yang dipesankan, dengan demikian tercipta situasi komunikasi yang serasi.

Selanjutnya kalau kita sedikit melangkah memasuki komunikasi maka komunikasi itu merupakan suatu kegiatan manusia yang sedemikian otomatis. Dengan berkomunikasi orang dapat menyampaikan pengalaman kepada orang lain, sehingga pengalaman itu menjadi milik orang lain pula, tanpa mengalaminya sendiri. Melalui komunikasi orang dapat merencanakan masa depannya, membentuk kelompok dan lain-lain. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan informasi, opini, ide, konsepsi, pengetahuan, perasaan, sikap, perbuatan dan sebagainya kepada sesamanya secara timbal balik, baik sebagai penyampai maupun penerima

komunikasi. Sehingga dengan demikian, terbinalah perkembangan kepribadiannya baik sebagai diri pribadi maupun kemas sosial, serta tercapainya pula kehidupan bersama dan bermasyarakat.

Inilah sebabnya mengapa pada akhir-akhir ini di Indonesia komunikasi semakin penting dan diperhatikan orang. Hal ini karena komunikasi merupakan alat pembangunan, alat integrasi, alat kekuasaan, dan untuk itu komunikasi penting diketahui, dipahami serta dihayati semua orang, khususnya untuk penyelenggara pembangunan sebab mereka lebih banyak berhadapan dan berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan masyarakat luas.¹⁸

Deddy Mulyana menegaskan bahwa esensi atau inti komunikasi adalah persepsi. Siapa pun setuju dengan pendapat tersebut, sebab berdasarkan kajian yang ada dan dukungan teori yang memadai mendukung pendapat tersebut. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh ketepatan peserta komunikasi dalam mempersepsi objek yang dikomunikasikan.¹⁹

2. Komunikasi persuasi

a. Pengertian komunikasi persuasi

Proses ini dalam proses komunikasi adalah persuasi yang cara sadar digunakan seseorang (pimpinan) untuk memengaruhi orang lain (bawahan) yang menjadi penerima pesan/informasi. Para penerima

¹⁸

H.A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 4-6.

¹⁹

Redi Panuju, *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: Komunikasi Sebagai Kegiatan Komunikasi Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 43.

informasi yang terpengaruh secara sadar pula, merasakan bukan sebagai paksaan (koersif) dari pengirim. Efek positif dari persuasi adalah adanya kesadaran dan kerelaan penerima untuk mengikuti pesan yang diterimanya²⁰

b. tujuan komunikasi persuasi

Tujuan dari komunikasi persuasi adalah perubahan sikap. Sikap pada dasarnya adalah tendensi kita terhadap sesuatu. Sikap adalah rasa suka atau tidak suka kita atas sesuatu. Menurut Murphy dan Newcomb sikap pada dasarnya adalah suatu cara pandangan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Allport sikap adalah kesiapan mental dan sistem saraf yang diorganisasikan mulai pengalaman, menimbulkan pengaruh langsung atau dinamis pada respon-respon seseorang terhadap semua objek dan situasi terkait. Sedangkan menurut Kresch, Crutchfield dan Ballachey sikap adalah sebuah sistem evaluasi positif atau negatif yang awet, perasaan-perasaan emosional dan tendensi tindakan pro atau kontra terhadap sebuah objek sosial.

Sikap sering dianggap memiliki tiga komponen yang pertama komponen afektif yaitu perasaan terhadap objek, yang kedua adalah komponen kognitif yaitu keyakinan terhadap sebuah objek dan yang ketiga adalah komponen perilaku yaitu tindakan terhadap terhadap objek. Intinya sikap adalah rangkuman terhadap objek sikap kita. Evaluasi rangkuman rasa suka atau tidak suka terhadap objek sikap

²⁰ Farid Hamid & Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 209.

intinya adalah inti dari sikap. Ketiga komponen sikap adalah manifestasi yang berbeda atas evaluasi inti itu. Tiga komponen sikap, yang memiliki tiga komponen tersebut afektif, komponen kognitif, dan komponen perilaku. Komponen afektif terhadap objek sikap, komponen kognitif berisi keyakinan terhadap objek sikap. Komponen perilaku berisi perilaku-perilaku atau perilaku disengaja terhadap objek sikap.²¹

c. Elemen Komunikasi

Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikasi. Komunikasi merupakan proses sebuah kegiatan yang berlangsung kontinu. Josep d D vito (1996) komunikasi adalah transaksi. Hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi merupakan proses dimana komponen-komponen saling terkait. Para peserta komunikasi saling beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan dan keseluruhan. Ada beberapa elemen komunikasi yang selalu terlibat dalam komunikasi, yaitu:

- 1) Komunikator. Komunikator adalah mengirim atau penyampai pesan.
- 2) Pesan adalah merupakan sesuatu, entah dalam bentuk ide, abstraksi realitas atau bahkan hal yang bersifat ekspektasi (harapan) yang disampaikan komunikator kepada penerima.

²¹ Werner J Severin & James W Tankard, *Teori Komunikasi Sejarah Metode dan Terapan dalam Media Massa*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 177-178.

- 3) Saluran merupakan sarana atau media yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan.
- 4) Komunikan merupakan penerima pesan, baik bersifat individual, kelompok, massa, maupun anggota organisasi.
- 5) Hambatan atau gangguan. Dalam setiap komunikasi pasti ada faktor yang menyebabkan proses komunikasi tidak berjalan efektif, tidak sesuai dengan diinginkan, dan bahkan acap kali menimbulkan salah pengertian. Gangguan bisa berasal dari komunikator, isi pesan, media yang digunakan, maupun pada penerimanya.
- 6) Umpan balik merupakan respons, tanggapan, atau reaksi atas suatu pesan. Umpan balik bisa dalam bentuk yang netral, ada yang mendukung (positif), ada yang menolak (negatif).
- 7) Efek merupakan akibat yang timbul dari komunikasi, baik berupa emosi, pikiran maupun perilaku.
- 8) Situasi merupakan keadaan yang ada atau terjadi pada saat berlangsung komunikasi. Situasi bisa berupa suhu, cuaca, tata ruang, sikap peserta komunikasi, dan tujuan-tujuan komunikasi.
- 9) Selektivitas merupakan filter yang digunakan peserta komunikasi untuk menyaring pesan. Baik berupa nilai-nilai budaya, mitos, prasangka, dan lainnya.

10) Lingkungan merupakan pihak lain yang ikut campur atau intervensi dalam komunikasi.²²

C. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam sosialisasi terjadi pertukaran informasi berupa nilai dan norma sosial dari generasi tua kepada generasi muda. Sosialisasi dilakukan agar nilai dan norma sosial dalam masyarakat dapat terus terpelihara sehingga masyarakat mampu menjalankan hidup bersama. Apabila nilai dan norma sosial tidak dapat dipahami dengan baik, akan terjadi hubungan kurang harmonis dan terjadi penyimpangan dalam masyarakat.²³

Sosialisasi dimulai sejak individu masih bayi yang dibimbing oleh orang tuanya hingga kelak ia siap menyesuaikan diri dalam kelompoknya, yaitu masyarakat. Orangtua atau lingkungan bayi akan memberikan bimbingan sejak kecil sehingga baik buruknya anak tergantung pada orang tua atau lingkungan sekitar sang bayi. Beberapa definisi sosialisasi menurut para ahli antara lain sebagai berikut.

1) Karel J. Veeger

Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi, individu belajar menjadi anggota masyarakat yang prosesnya tidak semata-

²² Redi Panuju, *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: Komunikasi sebagai Kegiatan Komunikasi sebagai Ilmu...*, hal. 39-40.

²³ Joan Hesti Gita Purwasih, Dkk, *Ensiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hal. 26.

mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan diri.

1) Charlotte Buehler

Sosialisasi adalah yang membantu individu untuk belajar dan menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan cara berfikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Proses ini dapat berjalan serasi dapat pula terjadi pertentangan akan tetapi, selama individu merasa memerlukan kelompoknya, ia tersedia untuk mengadakan beberapa kompromi terhadap tuntutan kelompok.

2) Soerjono soekanto

Sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota.

3) Bruce J. Cohen

Sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

4) Robert M. Z. Lawang

Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses ketika anggota masyarakat yang baru mempelajari

norma-norma dan nilai-nilai masyarakat tempat ia menjadi anggota kelompoknya.²⁴

Sosialisasi menjadi terminologi yang banyak digunakan dalam berbagai kajian khususnya dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Secara praktis, sosialisasi digunakan dalam 2 (dua) bentuk makna kata yang berbeda. *pertama*, sosialisasi digunakan untuk mengungkapkan penyertaan kata terhadap konsep utama agar memiliki kejelasan arti atau pemahaman, seperti “sosialisasi nilai-nilai kebangsaan” dalam konteks ini konsep utamanya yaitu nilai-nilai kebangsaan, terminologi sosialisasi tidak mengubah atau membentuk konsep yang baru. *Kedua*, sosialisasi digunakan untuk melengkapi kata atau menjadi bagian kata dari konsep yang ada dengan tujuan membentuk konsep baru, seperti “sosialisasi politik” dalam konteks ini konsep yang sudah ada yaitu politik yang memiliki dasar pemahaman tersendiri, pendekatan terminologi sosialisasi ke dalam konsep politik akan memunculkan konsep baru yang akan memiliki pemahaman baru pula.

Atas pemahaman tersebut, maka terminologi sosialisasi bisa diposisikan sebagai kata yang melengkapi dan memperjelas konsep yang sudah ada atau dapat pula di posisikan sebagai kata yang dapat membentuk frasa baru yang melahirkan pemahaman yang baru pula, sehingga terminologi sosialisasi dapat beradaptasi terhadap konsep yang telah ada yang disesuaikan dengan konsep dalam kajian rumpun ilmu sosial masing-masing.

²⁴ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 101.

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: *pertama*, sebagai usaha untuk mengubah milik seseorang/perorangan menjadi milik umum atau milik negara. *Kedua*, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. *Ketiga*, upaya masyarakat sehingga dikenal. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian sosialisasi sebagaimana dijelaskan melalui KBBI tersebut, apabila dianalisis dalam perspektif kajian kebijakan publik, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengertian sosialisasi sebagai usaha untuk mengubah milik perorangan menjadi milik umum (milik negara) dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kebijakan publik hakikatnya merupakan domain “publik” atau kewenangan/otoritas pemerintah, sehingga proses merubah kepemilikan menjadi milik umum bukan bagian dari proses kebijakan secara konseptual (memberi pemaknaan terhadap konsep utama), tetapi merupakan salah satu isu yang dapat digunakan sebagai substansi kebijakan.

Kedua, pengertian sosialisasi sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini dikarenakan proses seseorang untuk memahami nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan merupakan kajian dari rumpun ilmu sosiologi dan /atau ilmu antropologi. Dalam konteks kebijakan publik tidak adanya kajian proses

pembelajaran dari seorang anggota masyarakat secara individu, melainkan mengkaji aktivitas kolektif masyarakat atau publik dalam interaksinya dengan permasalahan publik, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan konteks proses kebijakan publik, maka tidak ada akan dikaji proses pembelajaran yang tengah dilakukan seorang anggota masyarakat terhadap nilai-nilai sosial masyarakat beserta dengan lingkungannya.

Ketiga, pengertian sosialisasi sebagai upaya memasyarakat sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan dengan kedua pengertian sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat dilaksanakan dengan baik juga mendapat dukungan dari masyarakat. Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik yang mana proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik²⁵.

Sosialisasi menurut itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri apapun untuk orang lain tidak akan tercapai.

Lingkungan sosial yang paling awal adalah keluarga. Ketika bayi dilahirkan, dia tidak tahu apa-apa tentang diri dan lingkungannya. Tetapi, tersebut memiliki potensi untuk mempelajari diri dan lingkungannya. Apa dan

²⁵ Dian Herdiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume 3; November 2018, hal. 13-15.

bagaimana dia belajar, banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia dilahirkan. Dan proses belajar itu bukan pertama-tama dari dirinya, tetapi karena hasil dari sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosial merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.²⁶

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

Sosialisasi adalah salah satu kegiatan penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan ataupun pemerintahan, dimana pemasaran sebagai salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan menghasilkan laba atau manfaat. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuannya tergantung keahliannya.

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan

²⁶ Joko Suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), hal 13.

tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting diantara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam suatu sistem untuk berpartisipasi.

Sosialisasi melibat semua orang yang ada di muka bumi, berkat adanya sosialisasi ini manusia mempunyai pengenalan dengan orang lain, dengan berbagai watak, budaya dan sikap. Maka dengan adanya sosialisasi kita bisa tahu, bahwasanya kita perlu banyak belajar dari sikap seseorang kita lihat.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai ketinggian tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing seseorang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.²⁷

Analisa penulisan apa yang dikatakan oleh Charles merupakan kita sebagai makhluk sosial butuh bantuan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan tangan orang lain. Jadi, kita harus lebih banyak belajar dari apa yang kita temui berbagai kultur. Sehingga dapat saling menghargai budaya, bahasa. Jadi, di manapun kita berada kita mesti tahu kultur orang lain agar hidup yang dijalani selalu dicintai masyarakat.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak ada pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan

²⁷ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 156.

lingkung sosialnya sendiri, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat adalah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak yang ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk dapat berkuasa.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.²⁸

Sosialisasi mengisyaratkan suatu makna dimana setiap individu berupaya menyelaraskan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi, seseorang akan mengenal dan melakukan penyesuaian dengan keadaan tempat dia bersosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus

²⁸ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi...*, hal. 230.

dilakukan.²⁹ Hal seperti itu, yang dikemukakan oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh individu untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang dapat diakui dalam masyarakat sekitarnya.

Menurut Soejono Dirdjosisworo, sebagaimana dikutip oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi terdiri atas aktivitas, yaitu:

- a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat.
- b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai-nilai dan tingkah laku dalam masyarakat dimana ia hidup.
- c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.³⁰

Proses sosialisasi adalah upaya seseorang mengenal, menyesuaikan dan mentransmisikan nilai-nilai dimana ia hidup sehingga dengan penyerapan nilai-nilai yang ada menjadi kekuatan normatif terhadap pembentukan kepribadian.

²⁹ J. Dwi Narwakoda Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Group, 2007), hal. 74.

³⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 57.

Pola-pola perilaku yang lazim dijumpai dan dihadapi ketika terjadi sosialisasi menggambarkan situasi yang beragam dan karakteristik. Pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam, yaitu:

- 1) Pola perilaku dalam hubungan-hubungan sosial antara individu dengan individu.
- 2) Pola perilaku dalam hubungan individu dengan kelompok.
- 3) Pola perilaku dalam hubungan kelompok dengan kelompok.

Melalui proses sosialisasi, masyarakat akan tahu bagaimana sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana sistem yang diterapkan. Jadi, seorang individu menjumpai pola-pola perilaku yang secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat interaksi sosial.
- b. Proses sosialisasi yang dikerjakan (secara sengaja) lewat proses pendidikan dan pengajaran.

Sosialisasi yang menunjukkan pola-pola perilaku yang tidak sengaja terjadi ketika individu berinteraksi melakukan tindakan peniruan, imitasi terhadap apa-apa yang disaksikan dari perilaku pekerti dari orang-orang sekitarnya. Selanjutnya apa yang disaksikan itu, mengalami penginternalisasian ke dalam diri dan mental terhadap pola-pola perilaku dan norma-norma yang ada.³¹

³¹ Anwar, *Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak*, Jurnal Al-Ma'iyah, Volume 11 No 1 Januari-Juni 2018, hal. 71-74.

Sosialisasi juga sebuah perilaku dan perubahan sosial yang dibentuk oleh seseorang melalui interaksi sosial. Perubahan sosial merupakan bentuk-bentuk baru dari kondisi yang lama. Perubahan sosial terjadi sebagai konsekuensi aktivitas manusia, inovasi, kemajuan sains dan sebagainya. Perubahan sosial ini menjadi salah satu terpenting dalam sosiologi pendidikan. Malahan, perubahan sosial yang terjadi membuat kajian sosiologi pendidikan semakin kompleks dan luas.³²

2. Bentuk-bentuk Sosialisasi

Dalam ilmu Sosiologi proses sosialisasi dapat dibedakan menjadi empat bagian diantaranya:

a. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer merupakan bentuk sosialisasi pertama yang diterima atau dijalani seorang anak di lingkungan keluarganya, dan berfungsi mengantar mereka memasuki kehidupan sebagai anggota masyarakat.

b. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi dengan orang lain setelah keluarga atau di sektor-sektor kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

c. Sosialisasi formal

Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan atau di suatu lembaga formal.

³² Silfia Hanani, *Sosiologi Pendidikan Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 42

d. Sosialisasi non-formal

Sosialisasi non-formal merupakan sosialisasi yang tidak sengaja dilakukan seseorang dan terbuka bagi semua orang.

3. Tahap Sosialisasi

Adapun tahap-tahap Sosialisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan (Preparatory Stage), tahap ini adalah tahap yang dialami manusia sejak dilahirkan dan sering dikatakan sebagai tahap anak berusia 0-2 tahun. Tahap ini juga seorang anak baru mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya.
- 2) Tahap Meniru (Play Stage), tahap ini seorang anak mulai belajar mengambil peran orang yang berada di sekitarnya. Ia mulai menirukan peran yang dilihat, didengar, atau dijalankan oleh orang tuannya lingkungan sekitarnya.
- 3) Tahap Siap Bertindak (Game Stage), tahap ini anak bukan hanya mengetahui peran yang harus dijalankan, tetapi telah mengetahui peran yang harus dijalankan secara sadar layaknya seorang remaja. Disini seorang telah mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan hubungannya semakin kompleks.
- 4) Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalized Stage), pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Tahap ini, mereka memahami peran yang dijalankan secara optimal. Seperti seorang murid yang memahami peran guru dan peran orang lain di sekelilingnya.³³

³³ Robinson & Philip, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 58.

4. Pembentukan Kelompok Sosial

1) Pengertian Kelompok Sosial

Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Oleh karena itu, kelompok sosial bukan hanya merupakan kumpulan manusia, tetapi juga mempunyai suatu ikatan psikologis yang diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial secara tetap dan teratur.³⁴

Interaksi sosial merupakan hubungan yang terjalin antara manusia, manusia dan kelompok, atau kelompok dan kelompok, oleh karena itu, interaksi sosial merupakan awal kehidupan sosial karena tanpa ada interaksi sosial, tidak akan ada kehidupan masyarakat.

Interaksi sosial tidak akan terjadi tanpa melalui proses kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Kontak secara langsung dilakukan tanpa melalui perantara. Adapun kontak sosial secara tidak langsung dilakukan melalui alat perantara, misalnya telepon seluler dan surat. Selain kontak sosial, interaksi sosial terjadi melalui komunikasi.

Komunikasi merupakan hubungan dua arah antara subjek dan objek pembicara. Ada lima unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator (orang yang menyampaikan pesan), komunikan (orang yang dikirim pesan), pesan (sesuatu yang disampaikan oleh komunikator),

³⁴ Rino Agustianto, *SUJU (Super Jitu) Sosiologi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 72.

media (alat untuk menyampaikan pesan), dan efek (perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan).³⁵

2) Terbentuknya kelompok sosial

Menurut Abdul Syani, terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Manusia membutuhkan komunikasi dalam membentuk kelompok, karena melalui komunikasi orang dapat mengadakan ikatan dan pengaruh psikologi secara timbal balik. Ada dua hasrat pokok manusia sehingga dia terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu:

- 1) Hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya
- 2) Hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitar

c. Dampak kelompok sosial

Dampak yang timbul dari adanya kelompok sosial dalam masyarakat multikultural adalah dapat menimbulkan konflik antara anggota masing-masing kelompok. Karena dalam kehidupan masyarakat multikultural sering tidak dapat dihindari berkembangnya paham-paham atau cara hidup yang didasarkan pada etnosentrisme, primordialisme, aliran, sektarianisme dan sebagainya.³⁶

³⁵ Joan Hesti Gita Purwasih, Dkk, *Ensiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hal. 22.

³⁶ Rino Agustianto, *SUJU (Super Jitu) Sosiologi...*, hal.73.

D. Implementasi

1. Pengertian implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁷ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektifitas.³⁸

Presman dan Wildavsky, seperti yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih sulistyastuti, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi sebagai janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output*, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).³⁹

³⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 70.

³⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39.

³⁹ Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hal. 20.

Menurut Hanifah Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.⁴⁰

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan mempengaruhi hasil yang diharapkan.

2. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Hom yang dikutip oleh Dewi Rahayu, mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh

⁴⁰ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 67.

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai faktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Implikasi dan Tahap-tahap Implementasi

Menurut Luankali yang dikutip Rahayu Kusuma Dewi dalam bukunya studi analisis kebijakan implikasi implementasi kebijakan secara ringkas mencakup hal-hal sebagai berikut:

⁴¹ Dewi Rahayu Kusuma, *Studi Analisis Kebijakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 157.

- a. Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan daerah, atau keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan.
 - b. Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.
 - c. Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu (pengesahan undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi).
 - d. Pelaksanaan keputusan
 - e. Kesiapan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran.
 - f. Ada dampak yang dipersepsikan oleh badan-badan decision making (pengambilan keputusan)
 - g. Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan.
 - h. Rekomendasi untuk revisi atau melanjutkan kebijakan tersebut atau mengubah dalam bentuk suatu kebijakan baru.⁴²
4. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan menurut Leo Agustino sebagaimana dikutip oleh Rahayu Kusuma Dewi, sebagai berikut:

- b. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.

Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimatif. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan.

⁴² Dewi Rahayu Kusuma, *Studi Analisis Kebijakan...*, hal. 44.

c. Kesadaran untuk menerima kebijakan

Bermain dalam ranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah mindset warga.

d. Ada tidak sanksi hukum

Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena sanksi hukum yang dijabarkan oleh suatu hukum yang diterapkan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya.

e. Kepentingan pribadi atau kelompok

Subjek kebijakan (individu atau kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut terpenuhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

f. Bertentangan dengan nilai yang ada

Implementasi kebijakan pun berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada pada suatu daerah. Wujudnya kepatuhan selektif Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan dalam suatu organisasi.

g. Waktu

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang pada awalnya ditolak dan dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

h. Sosialisasi

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakannya atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintahan melalui kebijakan yang di formulasikannya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

i. Koordinasi antar-lembaga atau antar-organisasi

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan atau stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi.⁴³

5. Model implementasi kebijakan publik

Berdasarkan arah kebijakan terdapat 3 (tiga) model implementasi kebijakan publik yaitu (1) model pendekatan *Top-down*, (2) model

⁴³ Dewi Rahayu Kusuma, *Studi Analisis Kebijakan...*, hal. 65.

pendekatan *Bottom-up*, dan (3) model pendekatan sintesis (Hybrid Theories) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Model Pendekatan *Top-down*

Model implementasi Top-Down (model rasional) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat implementasi sukses. Van Meter dan Van Horn yang diaktualisasi oleh Imamura berdasarkan pandangan bahwa dalam implementasi kebijakan pertimbangan isi dengan tipe kebijakan. Hood oleh Ocampo menyatakan implementasi sebagai administrasi yang sempurna. Hogwood dan Gunn yang diaktualisasikan oleh Jans menyatakan ada beberapa syarat untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna. Grindle yang diaktualisasikan oleh Nielsen memandang implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Pendapat ini dapat diartikan bahwa tindakan-tindakan yang oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Contohnya adalah peraturan pemerintah yang dikategorikan sebagai *decentralized policies*, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun pengimplementasiannya diserahkan pada masing-masing daerah (bersifat *top-down*). Dengan demikian model yang digunakan untuk melihat implementasi peraturan

pemerintahan sebaiknya menggunakan model implementasi dengan pendekatan *Top-Down*. Model yang menggunakan pendekatan *Top-Down* ditandai dengan cara kerja model ini yang dimulai dengan memahami kebijakan dan kemudian melihat efektivitas pencapaian tujuan kebijakan tersebut di lapangan. Pendekatan *Top-Down* lebih tepat digunakan untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan telah tercapai di lapangan atau tidak.

Selain Van Meter dan Van Hom yang diaktualisasikan oleh Imamar, model *top-down* dikemukakan juga oleh Muzmanian dan Sabatier yang diaktualisasikan oleh Bempah yang meninjau implementasi dari kerangka analisis. Model *top-down* yang dikemukakan oleh kedua ahli ini dikenal dan dianggap sebagai salah satu model *top-down* paling maju, karena keduanya telah mencoba mensintesis ide-ide dari pencetus teori modal *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam kondisi bagi implementasi yang baik, yaitu:

- 1) Standar evaluasi dan sumber legal
- 2) Teori kausal yang memadai, sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat bagaimana melakukan perubahan.

- 3) Integrasi organisasi pelaksanaan, guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.
- 4) Para implementator mempunyai komitmen dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimilikinya guna mewujudkan tujuan kebijakan .
- 5) Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuatan dalam hal ini legislatif dan eksekutif.
- 6) Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan, atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakan tersebut.⁴⁴

b. Model Pendekatan Bottom-Up

Pendekatan *Bottom-Up* ini sering pula dianggap sebagai lahan harapan (*promised land*), bertolak dari pengidentifikasian kerangka aktor-aktor yang terlibat dalam “*service delivery*” di dalam satu atau lebih wilayah lokal yang mempertanyakan kepada mereka tentang arah, strategi, aktivitas dan kontak-kontak mereka. Selanjutnya model ini menggunakan “kontak” sebagai sarana untuk mengembangkan teknik *network* guna mengidentifikasi aktor-aktor lokal, regional dan nasional yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah dan non pemerintah yang relevan. Pendekatan ini menyediakan

⁴⁴ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hal. 41-44.

suatu mekanisme untuk bergerak dari *street level bureaucrats (the bottom)* sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun privat. Dalam hal ini kebijakan dilakukan melalui antara-antara anggota-anggota organisasi dan klien mereka.

Dalam pendekatan ini masih menemukan kelemahan, karena asumsinya bahwa implementasi berlangsung di dalam lingkungan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, sehingga pendekatan ini keliru dalam menerima kesulitan empiris sebagai statement normatif maupun satu-satunya basis analisis atau kompleks masalah organisasi dan politik. Selain itu petugas lapangan tentu pula melakukan kekeliruannya. Karena itu berbahaya untuk menerima realitas deskriptif yang menunjukkan bahwa birokrat lapangan membuat kebijakan dan mengubahnya kedalam deskripsi tindakan.

c. Model Pendekatan Sintesis

Model pendekatan yang dikembangkan oleh Sabatier sintesisnya mengkombinasikan unit analisis *bottom-upers*, yaitu seluruh variasi aktor publik dan privat yang terlibat di dalam suatu masalah kebijakan, dengan top-downers, yaitu kepedulian pada cara-cara dimana kondisi-kondisi sosial ekonomi dan instrumen legal membatasi perilaku. Pendekatan ini tampaknya lebih berkaitan dengan konstruksi teori daripada dengan penyediaan pedoman bagi praktisi atau potret yang rinci atas situasi tertentu. Selain itu model ini lebih

cocok untuk menjelaskan suatu perubahan kebijakan dalam jangka waktu satu dekade atau lebih.⁴⁵

E. Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.⁴⁶

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang membutuhkan perhatian secara serius, karena persoalan kemiskinan telah membawa dampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diimplementasikan melalui berbagai program dari mulai sifatnya bantuan sosial, pemberdayaan sampai pada pemberian kredit usaha pada target yang memenuhi persyaratan. Salah satu program bantuan sosial yang dipadukan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah Program Keluarga Harapan (PKH).⁴⁷

⁴⁵ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame...*, hal. 45-46.

⁴⁶ Purwanto, Slamet Agus dan Sumartono, M. Makmur, “ *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan*, (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”, (2013) Vol.16, No.2, hal 81.

⁴⁷ Evi Fitrah, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan*” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2010) hal. 16.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).⁴⁸

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Pada tahun 2007, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk program keluarga harapan (PKH). Program keluarga harapan (PKH) dibentuk oleh Dinas Sosial yang mengadopsi program dari luar negeri yang dicoba untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembentukan program keluarga harapan (PKH) Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas

⁴⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggara Program Keluarga Harapan*, 2013, hal. 4-5.

Kesehatan. Bidikan ke arah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dari keluarga tersebut. Dan bidikan ke arah kesehatan bertujuan agar para anggota keluarga tercukupi gizinya dan tidak terserang gizi buruk.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, program PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat program PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui program PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.⁴⁹

Program PKH akan Memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, program PKH akan menambahkan pendapatan bagi individu-individu dalam RTSM/KSM melalui pengurangan beban rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai

⁴⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, No 1 Tahun 2018, *Tentang Program Keluarga Harapan*, hal. 5-6.

kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, nutrisi, pendidikan dan kapasitas anak di masa depan. Program ini juga memberikan kepastian anak di masa depan (*insurance effect*).

2) Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 pasal 2 tentang tujuan program keluarga harapan:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesejahteraan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenal manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

3) Kriteria Komponen Penerima PKH

Kriteria komponen penerima PKH terdiri atas:

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

- 1) Ibu hamil/menyusui
- 2) Anak berupa berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:

- 1) Anak SD/MI atau sederajat.

- 2) Anak SMP/MTs atau sederajat
- 3) Anak SMA/MA atau sederajat
- 4) Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- 1) Lanjut usia mulai dari umur 60 (enam puluh) tahun
- 2) Penyandang disabilitas

4) Hak dan Kewajiban Peserta KPM PKH

a. Hak Peserta KPM PKH

Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:

- 1) Menerima bantuan sosial
- 2) Pendamping sosial
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, tanah dan bangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari

hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun

- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.⁵⁰

Gambar 2.1. kewajiban anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan kriteria komponen.



Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Pasal 3,4 dan 5 dan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2016.

⁵⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, hal. 25-28.

5. Mekanisme penerimaan PKH

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

b. Penetapan Calon Peserta PKH

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon keluarga penerima manfaat menurut daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan program PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

Sumber data yang ditetapkan sasaran yang berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 mei 2016 tentang mekanisme penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin.

Dalam menetapkan sasaran perluasan memperhatikan pula beberapa hal yaitu:

1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan

- a) Skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan.
- b) Perlindungan dan jaminan sosial adaptif bagi keluarga yang terkena dampak bencana.

2) Usulan Daerah

Daerah membuat usulan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH.
- b) Menyediakan fasilitas sekretariat pelaksanaan PKH Kabupaten/Kota.
- c) Menyediakan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH di Kecamatan.
- d) Menyediakan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5% terhitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

3) Penyimpanan awal dan validasi

Direktur Jaminan Sosial Keluarga membuat Surat Keputusan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat program PKH menurut daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai data calon peserta yang akan divalidasi oleh pelaksana PKH di daerah.

Penetapan data awal yang akan divalidasi diawali dengan penentuan sumber data, sebagai berikut:

- a) Data terpadu program penanganan fakir miskin, dikecualikan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat terpencil sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01

Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- b) Dalam hal pemerintah daerah memiliki data baru sebagai data sebagai data usulan daerah, maka dapat diusulkan kepada kementerian sosial dengan mekanisme tersendiri.

c. Persiapan daerah

Daerah lokasi perluasan PKH, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk pelaksana Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.
- 2) Pembentukan tim koordinasi teknis program PKH di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
- 3) Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan program PKH Kabupaten/Kota.
- 4) Kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan program PKH di Kecamatan.
- 5) Melakukan sosialisasi program PKH kepada:
 - a) Tim koordinasi Kabupaten/Kota.
 - b) Aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

4. Pertemuan awal dan validasi

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang program PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal.

Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible*). Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi
 - a. Data awal Calon KPM PKH: Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi E-PKH untuk dilaksanakan validasi.
 - b. Pendamping sosial program PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:
 - 1) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat
 - 2) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya.
 - 3) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat tercantum.

2. Pelaksanaan pertemuan awal

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH yaitu:

- a. Menginformasikan tujuan program PKH.

- b. Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank.
- c. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program.
- d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan program PKH.
- e. Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH.
- f. Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH.
- g. Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan.
- h. Penjelasan komitmen pendidikan.
- i. Penjelasan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai 60 tahun keatas.
- j. menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program.
- k. Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.

3. Pelaksanaan validasi

Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi

rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi.

4. Kelengkapan data pembukaan rekening bank

Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal *Know Your Customer* (KYC) yang terdiri atas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif.⁵¹

a. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria program PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan:

- 1) hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank.
- 2) hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data.

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

b. Penyaluran bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan (*eligible*), memenuhi

⁵¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia..., hal. 37-41

kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- 2) Bantuan sosial program PKH terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen.
- 3) Bantuan tetap adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 4) Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial.
- 5) Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga.
- 6) Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- 7) Besaran bantuan Program Keluarga Harapan setiap komponen:
 - a) Komponen pendidikan
 - Sekolah Dasar (SD) : Rp. 900.000,00/tahun
 - Sekolah Menengah Pertama(SMP): Rp. 1.500.000,00/tahun
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) : Rp. 2.000.000,00/tahun
 - b) Komponen Kesehatan

- Ibu hamil : Rp. 2.400.000,00/tahun
- Anak balita : Rp. 2.400.000,00/tahun

c) Komponen Kesejahteraan Sosial

- Disabilitas : Rp. 2.400.000,00/tahun
- Lanjut usia (Lansia) : Rp. 2.400.000,00/tahun

9) Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai.

5. Pendamping PKH

Pendamping bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial program PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH.

Pendamping komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a) Pendamping Sosial program PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampingiannya setiap bulan.

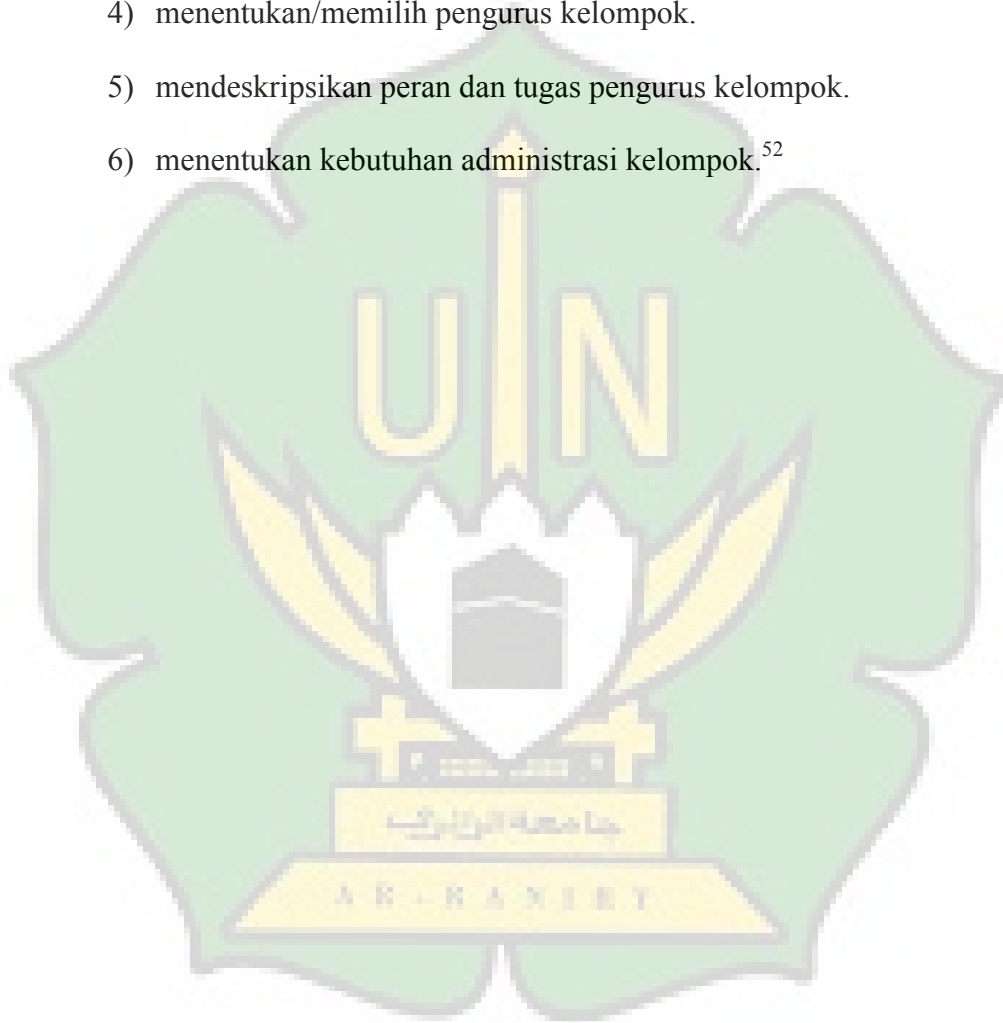
- b) Pendamping Sosial program PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran.
- c) Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- d) Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH dapat membentuk kelompok KPM PKH berdasarkan wilayah damingannya. Pembentukan kelompok KPM PKH bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program PKH.

Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Identifikasi alamat domisili dan potensi masing-masing KPM.
- b) Pembagian dan pembentukan kelompok KPM dengan masing-masing beranggotakan 10 hingga 30 KPM, dengan kriteria:
 - 1) pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal KPM.

- 2) jika memungkinkan, pembentukan kelompok didasarkan pada jenis/tujuan tertentu, seperti: kelompok usaha/ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
- 3) menentukan tujuan kelompok.
- 4) menentukan/memilih pengurus kelompok.
- 5) mendeskripsikan peran dan tugas pengurus kelompok.
- 6) menentukan kebutuhan administrasi kelompok.⁵²



⁵² Kementerian Sosial Republik Indonesia..., hal. 41-44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵³ Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku, sehingga dapat diamati dan dianalisis. Penelitian kualitatif adalah payung yang mencakup beberapa bentuk penyelidikan yang membantu kita memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dengan sedikit gangguan terhadap keadaan alami.⁵⁴ Alasan penggunaan pendekatan kualitatif yakni agar dalam pencarian makna dibalik masalah dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan tanpa banyak campur tangan dari peneliti.⁵⁵

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci suatu fenomena sosial, seperti konflik sosial, interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain. Desain ini menggambarkan dan mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti bagaimana upaya sesuai persoalan yang akan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 2.

⁵⁴ S. Aminah & Roikan, *Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 54.

⁵⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 62.

dipecahkan sekaligus menjawab permasalahan penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengupayakan semampu peneliti tentang bagaimana keadaan di lapangan dalam penerapan program PKH yang diterapkan oleh pemerintahan Kecamatan Gunung Meriah, desa-desa, pendamping PKH, sehingga apa yang diharapkan kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat teratasi.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang baik, suatu yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.⁵⁷

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.⁵⁸ Karena metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif seperti melakukan wawancara, Observasi dengan langsung turun ke lapangan untuk mendapat data yang valid.

Penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *pertama*, penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *kedua*, penelitian ini menyajikan secara langsung hakikat

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 68.

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.1.

⁵⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 26.

hubungan antara penelitian dan responden. *ketiga*, penelitian ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵⁹

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan variabel yang akan diteliti dan kemampuan peneliti sendiri.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling. Metode sampling adalah pembicaraan bagaimana berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian, bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar terjadi sampel yang representatif.⁶¹ Dalam hal ini peneliti hanya mengambil salah satu teknik yang ada dalam *non probability sampling*. Dalam metode sampling peneliti gunakan *purposive sampling*, menurut sugiyono *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut margono, pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-

⁵⁹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1988), hal. 5.

⁶⁰ Sukardi, *Metode Penelitian dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 53.

⁶¹ Burhan bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ILMU Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 117.

ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain untuk sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁶²

Ciri utama dari sampling ini ialah apabila ada anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Sebagai contohnya untuk meneliti kualitas jagung, maka sampel sumber datanya orang yang ahli dalam pertanian. Teknik ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan mengamati kasus-kasus tertentu.⁶³

Kegiatan sampling dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber pada penelitian kualitatif, informasi (data) pada umumnya diperoleh dari orang-orang yang diyakini mengetahui persoalan yang diteliti. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan dari informan. Jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri.

Informan adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah generalisasi. Untuk itu informan yang diambil dari wilayah generalisasi betul-betul representative (mewakili).⁶⁴ Informan penelitian merupakan subjek yang memahami objek penelitian sebagai

⁶² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), hal. 53.

⁶³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hal. 368-369.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal, 117-118.

pelaku maupun orang lain. Dalam hal lain, informan boleh sedikit dan boleh juga banyak. Hal ini tergantung terhadap kebutuhan dalam sebuah penelitian.⁶⁵

Dengan demikian informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang aktif yang terlibat secara langsung dalam kegiatan tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil yaitu LINJAMSOS dan Koordinator PKH, Camat Gunung Meriah, Kesejahteraan Masyarakat (kesmas) kecamatan Gunung Meriah, Keuchik dalam kecamatan Gunung Meriah sebanyak 3 orang, 2 Pendamping PKH kecamatan Gunung Meriah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 7 orang yang terdata sebagai anggota PKH dan peserta PKH yang di graduasi 2 orang.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, peneliti gunakan karena memang sesuai dan cocok untuk penelitian ini, dikarenakan informasi dan data yang peneliti butuhkan hanya dari objek penelitian dengan kriteria tertentu yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

⁶⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hal .76.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada metode laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer*, dan sumber *sekunder*. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁶⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seorang peneliti dalam menggunakan pengamatan melalui panca indra yang ikut dibantu dengan panca indra lainnya.⁶⁷

⁶⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hal. 120-121.

⁶⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 115.

Observasi dapat pula diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti, ada dua indra yang sangat vital dalam melakukan observasi, yaitu mata dan telinga.⁶⁸

Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, maka peneliti menggunakan metode observasi sebagai gambaran awal terhadap permasalahan yang diangkat juga untuk penambahan data penelitian selanjutnya. Peneliti menggunakan teknik observasi supaya dapat mengetahui langsung bagaimana mensosialisasi dan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

⁶⁸ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 52-53.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.⁶⁹

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan serta langsung bertatap muka dengan informan. Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam artian peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu untuk mewawancarai informan seperti pulpen atau pensil, buku tulis (notes), surat izin/surat tugas, soal yang telah disusun, instrumen, alat perekam guna untuk merekam apa yang dikatakan oleh informan dan kamera guna untuk mengambil gambar yang sedang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian.⁷⁰ Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan bisa berupa bentuk tulisan dan orang yang terlibat dalam program tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi, dokumentasi bisa tertulis maupun lainnya yang bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan Program

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hal. 137.

⁷⁰ Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 70.

Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

4. Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).⁷¹ Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dalam proses analisis suatu data mempunyai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁷² Selain itu, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷³

Dalam tahap ini, analisa data dilakukan sekaligus pada waktu pengumpulan data melalui wawancara dan/atau observasi. Sebagai contoh, pada waktu penelitian berlangsung apakah melakukan wawancara atau observasi, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban responden atau mendapatkan informasi dari informan.⁷⁴

⁷¹ Andi Mappiare, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80.

⁷² Moh. Nazier, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 346.

⁷³ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 248.

⁷⁴ Bukhari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 96.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data- data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang didapat mengenai sosialisasi dan implementasi Program PKH dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah- langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:⁷⁵

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

⁷⁵ Miles, Matthew B, “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru/ Matthew B, Miles dan A michael Huberman*” Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hal. 15.

perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi.

c) Menyajikan data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.⁷⁶

d) Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁷⁷

⁷⁶ Imran Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: Alfian Primatama, 2011), hal. 26.
⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Proses Pembentukan Kecamatan Gunung Meriah

Kabupaten Aceh Singkil merupakan kecamatan hasil dari pemekaran kabupaten induk yaitu Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827), yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Simpang Kiri.

Kecamatan Gunung Meriah merupakan kecamatan hasil dari pemekaran dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah disahkan menjadi kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.⁷⁸

2. Letak Geografis Kecamatan Gunung Meriah.

Berdasar data statistik dan laporan kecamatan, Kecamatan Gunung Meriah merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak kurang lebih 40 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kecamatan Gunung Meriah berbatasan dengan :

⁷⁸ Kecamatan Gunung Meriah dalam Angka 2019, *Badan Pusat Statistik*, Kabupaten Aceh Singkil.

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Danau Paris.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkil Utara.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Baharu.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan.

3. Karakteristik Penduduk Kecamatan Gunung Meriah

Kecamatan Gunung Meriah memiliki keanekaragaman dan karakteristik penduduknya, dalam hal ini dapat dibagi dalam karakteristik Berdasarkan Kelompok Umur.

Pada pertengahan tahun 2019 jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Meriah tercatat sebanyak 39.422. untuk lebih jelasnya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 4.1. Karakteristik Berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR (Tahun)	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	0 s/d 4	2.894	7,34
2	5 s/d 9	4.443	11,27
3	10 s/d 14	4.522	11,47
4	5 s/d 19	4.001	10,15
5	20 s/d 24	4.195	10,64
6	25 s/d 29	4.486	11,38
7	30 s/d 34	3.868	9,81
8	35 s/d 39	2.948	7,48
9	40 s/d 44	2.443	6,2

10	45 s/d 49	1.774	4,42
11	50 s/d 54	1.229	3,3
12	55 s/d 59	914	2,32
13	60 s/d 64	533	1,35
14	65 s/d 69	427	1,08
15	70 s/d 74	304	0,77
16	75 s/d 79	401	1,02
	Jumlah	39.422	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2019.

4. Karakteristik Berdasarkan Mata Pencaharian.

Jika dilihat keadaan penduduk Kecamatan Gunung Meriah pada pertengahan tahun 2019 berdasarkan mata pencaharian penduduk, maka mata pencaharian utama terbesar sektor pertanian dalam arti luas yaitu sebesar 85,59% seperti petani, wiraswasta, dan karyawan swasta. Selain itu mata pencaharian penduduk terdiri dari peternak, pedagang, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, dan lain-lain. Masing-masing jumlah tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Karakteristik Berdasarkan Mata Pencaharian.

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Petani/perkebunan	3.712	34,55
2	PNS	964	8,97
3	TNI	66	0,62

4	Kepolisian RI (POLRI)	106	0,99
5	Anggota DPRK	8	0,07
6	Peternak	9	0,08
7	Pedagang	161	1,5
8	Karyawan Swasta	2.082	19,38
9	Karyawan BUMN	23	0,22
10	Transportasi	113	1,05
11	Industri	38	0,35
12	Wiraswasta	3.401	31,66
13	Dokter	13	0,12
14	Bidan	25	0,23
15	Perawat	22	0,21
Jumlah		10.743	10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2019

5. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan yang dimiliki sebagian besar penduduk Kecamatan Gunung Meriah pada pertengahan 2019 adalah belum / tidak tamat SD yaitu sebanyak kurang lebih 43,83% dari total penduduk. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Belum/Tidak Tamat SD	17.623	42,21
2	Tamat SD	8.848	21,19
3	SLTP/Sederajat	6.106	14,61
4	SLTA/Sederajat	7.209	17,29
5	Diploma I/II	310	0,74
6	Akademi Diploma III	477	1,14
7	Strata I	1.148	2,75
8	Strata II	29	0,07
9	Strata III	1	0,002
Jumlah		41.746	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2019.

6. Karakteristik Berdasarkan Agama.

Pada pertengahan tahun 2019 Mayoritas Agama yang dianut sebagian besar penduduk di Kecamatan Gunung Meriah adalah Islam dengan jumlah 39.725 jiwa atau sebanyak 93,51%, Kristen dengan jumlah 2.749 jiwa atau sebanyak 6,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 4. Karakteristik Berdasarkan Agama

NO		AGAMA	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1		Islam	39.725	93,51
2		Kristen	2.749	6,47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2019.

7. Karakteristik Berdasarkan Kepala Keluarga.

Pada akhir tahun 2019 jumlah kepala keluarga di Kecamatan Gunung Meriah tercatat sebanyak 10.697 jiwa Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Karakteristik Berdasarkan Kepala Keluarga.

NO	DESA	JUMLAH KK (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Gunung Lagan	678	6,34
2	Sebatang	113	0,11
3	Tulaan	737	6,9
4	Sidorejo	923	8,63
5	Blok 15	500	4,67
6	Blok 18	177	1,65
7	Blok 31	96	0,9
8	Blok VI Baru	817	7,64
9	Rimo	1.013	9,47
10	Tanjung Betik	65	0,61
11	Penjahitan	48	0,45
12	Bukit Harapan	1.064	10
13	Cingkam	149	1,4
14	Labuhan Kera	39	0,36
15	Tanah Bara	600	5,6
16	Suka Makmur	565	5,3
17	Perangusan	103	0,96
18	Seping Baru	61	0,57
19	Tanah Merah	239	2,23
20	Pertampakan	66	0,62
21	Pandan Sari	649	6,07
22	Sanggaberu Siulusan	436	4,07
23	Tunas Harapan	310	2,9
24	Lae Butar	751	7,02
25	Sianjo-anjo	493	4,61
Jumlah		10.697	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2019.

8. Karakteristik Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan penduduk di Kecamatan Gunung Meriah pada pertengahan tahun 2019, jenis pekerjaan terbanyak adalah belum /tidak bekerja yaitu sebanyak kurang lebih 26,64%dari total penduduk masing-masing jumlah tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4. 6. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KK (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Belum/Tidak Bekerja	10.501	26,64
2	IRT	7224	18,32
3	Pelajar/Mahasiswa	9.649	24,49
4	Pensiunan	69	0,17
5	PNS/TNI/POLRI	1.136	2,88
6	Perdagangan	198	0,5
7	Petani/perkebunan	3.712	9,42
8	Peternak	9	0,02
9	Nelayan/perikanan	25	0,06
10	Industri	38	0,01
11	Konstruksi	34	0,09
12	Transportasi	113	0,29
13	Karyawan Swasta	2.082	5,28
14	Karyawan BUMN	23	0,06
15	Karyawan BUMD	10	0,03
16	Karyawan Honorer	127	0,32
17	Buruh Harian Lepas	212	0,54
18	Buruh Tani	166	0,42
19	Tukang Batu	26	0,07
20	Tukang Jahit	16	0,04
21	Mekanik	27	0,07
22	Wartawan	5	0,03

23	Ust/Muballigh	12	0,03
24	Anggota DPRK	8	0,02
25	Dokter	13	0,03
26	Bidan	25	0,06
27	Perawat	22	0,05
28	Supir	178	0,44
29	Pedagang	161	0,41
30	Wiraswasta	3.401	8,63
31	Lain-lain	205	0,52
Jumlah		39.422	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2019.

B. Hasil penelitian dan Pembahasan

1. Sosialisasi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan

Salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Pedoman PKH 2020, Program PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁷⁹

Tugas pendamping sosial program PKH secara umum terbagi menjadi dua yaitu tugas program dan tugas rutin yang akan dilaksanakan oleh pendamping PKH di wilayah masing-masing. Tugas persiapan program merupakan tugas pendamping saat awal menjadi pendamping sosial PKH yang meliputi menyelenggarakan pertemuan awal, sosialisasi program kepada calon KPM dan

⁷⁹ Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan PKH*, Tahun 2020, hal. 1.

masyarakat umum, membentuk kelompok peserta dan menentukan ketua kelompok.

Sedangkan tugas rutin pendamping program PKH adalah melaksanakan pertemuan bulanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pertemuan bulanan ini gunanya untuk menjelaskan kembali tentang Program PKH dan menanyakan kembali setiap peserta PKH apakah ada yang menambah komponen yang ada di dalam keluarga dan mengeluarkan apabila komponen tersebut tidak ada lagi dan mengurangi komponen apabila anaknya sudah selesai SMA. Dari hasil wawancara dari Pendamping Program PKH Kecamatan bapak Safral Miswardin:

*“Dalam pertemuan bulanan kami selalu mengupdate keluarga penerima manfaat apakah ada keluarga yang menambah komponen atau malah dikurangi dengan sebab tidak sesuai dengan syarat-syarat penerima Program PKH”.*⁸⁰

Dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) Pendamping sosial melakukan strategi dalam pertemuan awal. Sebelum pertemuan awal dilaksanakan, para pendamping membagikan undangan dari Kementerian Sosial berupa SUPA, SUPA ini adalah surat undangan pertemuan awal. Masyarakat yang dapat undang dari Kementerian Sosial adalah orang yang terdata kategori miskin. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Singkil bapak Ardiansyah, S.Sos.I:

“masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial letaknya di Pusat Data dan Informasi (pusdatin) adalah orang yang sangat miskin, itu anggapan

⁸⁰ Wawancara dengan Safral Miswardin (Pendamping PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 4 Agustus 2020.

di pusat walaupun kenyataan di lapangan ada yang sudah sejahtera, makanya sekarang diserahkan kepala desa untuk mengupdate data sehingga data yang terapkan valid”.⁸¹

Dari pernyataan pak Ardiansyah tadi, data yang digunakan adalah data yang lama sehingga program PKH kurang tepat, pendamping PKH Kecamatan Gunung Meriah bapak Safral Miswardin, S.Sos dalam kutipan wawancara :

“warga yang terdata di pusat adalah RTSM yaitu rumah tangga sangat miskin yang dipakai sekarang data tahun 2015 maka penerimaan PKH sudah tidak seratus persen tepat sasaran perkiraan saya sekitar 80 persen karena yang menerima hanya sebagian sudah sejahtera”.⁸²

Setelah itu, diterima undangan tersebut oleh masyarakat yang mendapatkan undang itu, pendamping PKH langsung menentukan letak dan waktu tempat kumpulnya setelah beberapa hari mendapatkan undangan. Tempat yang digunakan biasanya di tempat umum dimana tempat yang sesuai mengenalkan program PKH kepada calon peserta PKH. Hal Ini berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH ibu Ariyanti:

“Biasanya kami mengumpulkan peserta calon PKH di tempat umum biasanya di Kantor camat dan di Bank BRI di sana biasanya kami”. Selanjutnya masyarakat sudah terkumpul semuanya sesuai dengan arahan pendamping disinilah sosialisasi perdana untuk mengenalkan PKH kepada calon peserta PKH dan menyeleksi kembali berhak atau tidaknya mendapatkan program PKH”.⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Ardiansyah (Koordinator PKH Kabupaten Aceh Singkil) pada tanggal 5 Agustus 2020.

⁸² Wawancara dengan Safral Miswardin (Pendamping PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 4 Agustus 2020.

⁸³ Wawancara dengan Ariyanti (Pendamping PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada Tanggal 11 Agustus 2020.

Dalam pengenalan program PKH ini harus tempat yang memang mudah untuk mensosialisasikan program PKH ini, karena strategi komunikasi itu sangat penting untuk menjelaskan program tersebut. Dan dalam pertemuan ini menyeleksi kembali peserta calon program PKH berdasarkan kutipan dari koordinator PKH Kabupaten Ardiansyah “pertemuan awal inilah kami mengenal PKH dan menyeleksi cocok atau tidaknya yang calon penerima PKH”.⁸⁴ dalam hal ini bukan hanya pengakuan petugas akan tetapi penerima pun harus diteliti dan dalam hasil wawancara dengan peserta PKH ibu Ernawati kutipan yang diambil:

“Pada awal saya mendapatkan PKH itu pada tahun 2015, pada waktu itu ada surat undangan yang di kasihkan sama kami yang memberikan undangan itu Memang bukan dari pengurus desa tapi pendamping PKH dan langsung memberitahukan tempat pertemuannya.”⁸⁵

Tugas-tugas pendamping untuk menempatkan kembali siapa yang layak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan, setelah itu ada pertemuan bulanan, pertemuan bulan ini dilakukan berkelompok sebelumnya sudah ditentukan ketua kelompok. Sebelum pendamping PKH melakukan sosialisasi selanjutnya, diberitahukan lebih dahulu ke ketua kelompok, ketua kelompok yang memberitahukan ke peserta lain, setelah kumpul semua para pendamping menanyakan kembali komponen-komponen apa saja yang dapat dan komponen apa saja bertambah. dan ini diperjelas oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ibu Yusniar:

⁸⁴ Wawancara dengan Ardiansyah (Koordinator PKH Kabupaten Aceh Singkil) pada tanggal 5 Agustus 2020.

⁸⁵ Wawancara dengan Ernawati (Keluarga Penerima Manfaat PKH) pada tanggal 05 Agustus 2020.

“Sebelum kami ada rapat tentang PKH terlebih dahulu diberitahukan kepada ketua kelompok nanti ketua kelompok yang memberitahukan ke peserta lainnya.”⁸⁶

Dalam pertemuan kelompok tersebut Jadi tahap sosialisasi ini memperkuat pertemuan awal, pendamping memastikan paham atau tidak peserta PKH. Dimana hasil wawancara dengan pendamping PKH Bapak ardiansyah “dalam pertemuan awal ini sebagai penyeleksi diterima atau tidaknya calon peserta PKH”.⁸⁷

Jadi tahap pensosialisasian Pendamping PKH terhadap peserta PKH ada dua, pertama perempuan awal yang sudah dijelaskan di atas, kemudian tahap kedua yaitu pertemuan kelompok, pertemuan kelompok ini dilakukan di rumah ketua kelompok dimana semua wajib datang untuk mengetahui prosedur-prosedur program PKH dan tahap inilah pendamping PKH melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peserta. Dengan ini ditegaskan oleh pendamping PKH bapak Safral Miswardin:

“untuk cara kami pendekatan terhadap peserta PKH ialah pertemuan kelompok karena mereka sudah paham apa saja kewajiban dan sanksi mereka”.⁸⁸

Selama peneliti meneliti di lapangan yang sangat menjadi pusat perhatian adalah data. Data yang diambil dari Kementrian Sosial yang dijadikan rujukan untuk menentukan miskinnya masyarakat tersebut adalah data lama. Beberapa informasi yang peneliti dapat dari berbagai informan data ini diambil mulai dari

⁸⁶ Wawancara dengan Yusniar (Keluarga Penerima Manfaat PKH) pada tanggal 6 Agustus 2020.

⁸⁷ Wawancara dengan Safral Miswardin, (Pendamping PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 4 Agustus 2020.

⁸⁸ Wawancara dengan Safral Miswardin (Pendamping PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 4 Agustus 2020.

tahun 2005, 2013, 2014, 2015 sampai 2017, walaupun perkiraan mereka berbeda-beda karena lupa tahun berapa kebenarannya. Seperti pernyataan dari Kepala desa Pertampakan bapak Salman yaitu “ saya ingat data itu data tahun 2013”⁸⁹. Meskipun data yang peneliti dapatkan berbeda, tapi ini salah satu problem yang saya dapatkan di lapangan. Rupanya sampai saat ini data lama masih dipakai. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid LINJAMSOS Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil bapak Syahrul Imrizal:

*“data yang diambil sampai saat ini adalah data yang lama sehingga walaupun dia sudah meninggal dunia ataupun sudah berpindah tempat tetap terdata mendapatkan bantuan seperti bantuan sosial dan bantuan lainnya.”*⁹⁰

Pernyataan pak Syahrul Imrizal dibenarkan oleh bapak Camat Gunung Meriah Drs. Johan Pahmi Sanip dalam kutipannya, “bahwa data yang digunakan saat ini adalah data lama dan sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang yang sudah banyak berubah”.⁹¹ Menurut PJ Kepala desa Tanah Merah bapak Irwansyah yaitu:

*“Diantara tantangan dan kekeliruan dalam menjalankan program PKH memang belum sinkronnya data lama dengan data baru, karena itu, permasalahan tidak tepatnya sasaran PKH adalah data miskin itu di ambil data lama sekitar tahun 2014 lalu maka inilah yang harus jadi pekerjaan, saya sendiri sudah pernah mendata tapi tidak ada respon dari pemerintahan.”*⁹²

⁸⁹ Wawancara dengan Salman (Kepala Desa Pertampakan) pada tanggal 12 Agustus 2020.

⁹⁰ Wawancara dengan Imrizal (Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial) pada tanggal 06 Agustus 2020.

⁹¹ Johan Pahmi Sanip, Camat Gunung Meriah, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2020.

⁹² Wawancara dengan Irwansyah (PJ Kepala Desa Tanah Merah) pada tanggal 11 Agustus 2020.

Maka dari permasalahan ini pemerintahan-pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan desa lebih gigih dalam membangun daerah dengan cara mensejahterakan masyarakat miskin dari kehidupan mereka dengan sesuai memberikan atau tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Maka dari itu data yang harus diperbaharui dengan baik sesuai dengan yang membutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Implementasi Program PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan

Implementasi PKH di Kecamatan Gunung Meriah, perlu didukung oleh instansi penggerak dan masyarakat, sehingga program tersebut tetap berjalan dan dilaksanakan untuk direalisasikan dengan baik. Sesuai tujuan umum dari program PKH yaitu mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan kesejahteraan di Kecamatan Gunung Meriah. Namun pemerintahan saat ini saling mengharapkan baik dari pemerintahan pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota/ sampai tingkat Desa dalam penerapan data terbaru.

Pada saat awal mula program PKH ini sampai ke Aceh singkil pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, Kecamatan Gunung Meriah mendapatkan bantuan tersebut. Pada saat itu yang penerima program PKH itu sudah tepat sasaran karena yang penerima belum sejahtera. Tapi saat ini yang penerima pada saat ini sudah sebagian sejahtera bahkan bukan saja kebutuhan primer tercukupi tapi ada sebagian kebutuhan sekunder sudah ada seperti roda dua dan empat tetapi mereka masih mendapatkan. sebab data-data yang saat ini masuk beberapa tahun yang

lalu sampai saat ini belum diperbaharui. Sebagaimana pernyataan dari bapak Camat Gunung Meriah Drs. Johan Pahmi Sanip:

“ini menjadi problem yang saya rasakan memang sangat jadi masalah, yang saya lihat adalah pertama kali data awal sudah salah sasaran disebabkan ini kelalaian dari petugas, yang kedua ada yang masuk PKH sudah mampu lepas dari kemiskinan tapi belum diubah datanya, tapi pernah direncanakan Perubahan kedepan setiap 3 bulan sekali oleh petugas petugas Program PKH akan merevisi tetapi saat ini masih belum ada pergerakan dari yang dilakukan untuk mengubah data tersebut.”⁹³

Implementasi yang sangat bagus diterapkan program PKH sendiri bukan hanya memberikan padangan dengan materi program PKH atau uang diberikan akan tetapi program PKH ini adalah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan serta kesehatan sosial. Dalam program PKH sendiri disebut pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) merupakan proses belajar masyarakat untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku. Secara umum P2K2 bertujuan Untuk meningkatkan pengetahuan, mengenai pemahaman pendidikan, kesehatan dan mengelola keuangan bagi keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi P2K2, dukungan peserta program PKH dan masyarakat dalam mengimplementasikan P2K2 untuk berjalannya program PKH ini dengan baik, melalui akses pengimplementasian P2K2 tersebut mampu membuat keluarga penerima manfaat mampu mandiri dan sejahtera dan dapat mengurangi

⁹³ Wawancara dengan Johan Pahmi Sanip (Camat Gunung Meriah) pada tanggal 11 Agustus 2020.

kemiskinan yang ada di Indonesia dan khususnya di Kecamatan Gunung Meriah. menurut pandangan dari pendamping PKH Safral Miswardin:

“penerapan P2K2 tersebut kami terapkan dan kami jelaskan supaya mereka tau betul program PKH ini bukan untuk asal disalurkan, tetapi ini merupakan tempat untuk memberikan pemahaman bagaimana caranya mandiri tidak selalu mengharapkan dari benturan baik bentuk PKH maupun bentuk bantuan lain.”⁹⁴

Dari wawancara terhadap pendamping PKH, kita tau bahwa program PKH ini ingin membuat para peserta mandiri dan mampu membuat usaha. Setelah Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu, mandiri dan sejahtera maka para KPM tersebut sudah bisa di graduasi atau dikeluarkan dari peserta program PKH. Akan tetapi, hasil penelitian di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dipedoman pelaksanaan program PKH. Dari hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat ibu Mardiana mengutip perkataanya:

“untuk saat ini masih ada penerima manfaat yang mampu dalam segi ekonomi sudah tercukupi bisa dikatakan sudah sejahtera dari tahun-tahun sebelumnya, tapi belum di graduasi memang sebelumnya kebanyakan kurang mampu pada saat itu.”⁹⁵

Para pendamping Program PKH seharusnya lebih gigih pengimplementasian mengobservasi di lapangan keadaan yang sekarang masyarakat yang penerima program PKH apakah sudah banyak yang yang sejahtera, atau tidak ada lagi komponen tapi masih mendapatkan program ini, atau memang butuh suport agar masyarakat kategori miskin lebih kuat untuk lepas dari kemiskinan. Masyarakat yang sudah mengalami ekonomi yang baik, sudah

⁹⁴ Wawancara dengan Safral Miswardin (Pendamping Program PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 4 Agustus 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan Mardiana (Keluarga Penerima Manfaat PKH) pada tanggal 15 Agustus 2020.

mampu dan mandiri, inilah peran seharusnya yang diemban oleh pendamping PKH untuk menggraduasi peserta program PKH yang sudah keluar dari belenggu kemiskinan. Menurut pengakuan dari koordinator PKH Kabupaten bapak Ardiansyah ialah:

“sebenarnya kami graduasi KPM itu mudah, akan tetapi resiko yang kami emban apabila kami keluarkan tanpa ada strategi itu berdampak kepada kami, makanya kami harus butuh strategi dengan komunikasi persuasif kepada KPM dengan cara merayu dan menakuti sehingga mereka yang sudah mampu sadar dengan keadaannya.”⁹⁶

Melihat di lapangan yang didapat peneliti, masyarakat yang ingin di graduasi memang perlu hati-hati karena masyarakat yang dikeluarkan tersebut tidak senang dan menuntut orang lain yang setara dengan keadaan mereka atau yang lebih kaya dari yang dikeluarkan, dari kutipan yang diambil dari wawancara dengan ibu Khairunnisa:

“kenapa saya dikeluarkan padahal setara atau lebih berkeadaan dari pada saya kenapa saya aja yang di graduasi, padahal saya masih ada komponen-komponen yang harus ditanggung dan sebelum saya mendapatkan program PKH ini keadaan saya sudah seperti ini.”⁹⁷

Jadi memang untuk graduasi ini tidak mudah dan butuh waktu yang tepat untuk di graduasi dimana hasil wawancara dengan pendamping PKH Safral Miswardin “kami untuk menggraduasi itu perlu extra hati-hati karena ini berdampak besar”.⁹⁸

⁹⁶ Wawancara dengan Ardiansyah (Koordinator PKH Kabupaten Aceh Singkil) pada tanggal 5 Agustus 2020.

⁹⁷ Wawancara dengan Khirunnisa (Keluarga Penerima Manfaat yang di graduasi) pada tanggal 17 Agustus 2020.

⁹⁸ Wawancara dengan Safral Miswardin (Pendamping Program PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 4 Agustus 2020.

Jumlah keseluruhan penerima Program PKH di Kecamatan Gunung Meriah sekarang berjumlah 1125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan pada tahun 2020 di graduasi sebanyak 22 orang dalam 4 tahap di jalani, tahap pertama ada 4 KPM, tahap kedua 1 KPM, tahap ketiga 17 KPM, sedangkan tahap keempat belum ada Yang digraduasi sudah dianggap mampu di segi ekominya. Dari hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di graduasi ibu Mira yaitu:

“Pada saat saya dinyatakan dikeluarkan dari peserta PKH terkejut, padahal masih banyak yang lebih kaya lebih mampu daripada saya, kenapa saya dikeluarkan, padahal saya tidak mempunyai aset dan saya satu batang sawit pun tidak ada, tapi banyak saya lihat di kampung saya ini banyak yang lebih mampu daripada saya, kenapa saya aja yang dikeluarkan seharusnya setara dengan saya harus di graduasi juga.”⁹⁹

Melihat keadaan yang didapat di lapangan, para pendamping program PKH harus lebih tegas dalam melakukan sesuatu agar masyarakat tidak ada kesenjangan sosial, dalam segi menggraduasi seharusnya dipelajari dan melihat keadaan masyarakat terlebih dahulu mana yang seharusnya dipertahankan dalam penerimaan Program PKH dan yang seharusnya di graduasi dalam penerimaan program PKH. Lebih baik merata yang di graduasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam implementasi PKH ada tiga komponen yang diberikan. pertama komponen pendidikan berumur 6-18 tahun mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua, komponen Kesehatan, komponen ini

⁹⁹ Wawancara dengan Mira (Keluarga Penerima Manfaat yang di graduasi) Pada tanggal 17 Agustus 2020.

terbagi dua yaitu ibu hamil dan anak balita. Sedangkan yang Ketiga komponen kesejahteraan sosial meliputi disabilitas dan lansia berumur 70 keatas. Apabila kriteria-kriteria tersebut tidak ada walaupun sangat miskin tetap tidak bisa mendapatkan. sebagaimana wawancara dengan pendamping PKH ibu Ariyanti yaitu:

“kalau masyarakat tergolong miskin ada kriteria itu bisa masuk peserta PKH, kriterianya itu adalah pendidikan anak berusia 6-18 tahun, kedua kriteria kesehatan ibu hamil dan anak balita baru berumur 0-6 tahun dan kesejahteraan sosial ada dua yaitu disabilitas dan lanjut usia 70 di atas, kalau ada komponen ini bisa mendapatkan PKH dan apabila tidak ada komponen masyarakat tersebut tidak bisa mendapatkan PKH.”¹⁰⁰

Program PKH sangat membantu peserta PKH baik dalam kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan, dalam segi kesehatan bisa membantu ibu hamil dan anak balita, pada ibu-ibu hamil program PKH mewajibkan posyandu dan begitu juga dengan anak balita untuk mengatasi kurang gizi anak dengan adanya dana yang diberikan . Dalam pendidikan sendiri masyarakat yang mendapatkan program terpenuhi. Dalam wawancara terhadap penerima PKH ibu Kaidah:

“Program ini sangat membantu saya baik segi anak balita maupun anak sekolah, karena saya mendapatkan beberapa komponen seperti anak balita, anak SD dan SMP dan ini sangat membantu sekali. ketika saya membayar spp sekolah saya tidak terlalu susah lagi dan kelengkapan sekolah seperti buku, tas, baju dan lain-lain.”¹⁰¹

Program ini mampu sedikit dan banyak beban-beban yang dirasakan oleh penerima program PKH sendiri. Karena tujuannya PKH inilah adalah pengentasan kemiskinan dengan cara menjaga kesehatan anak dan memberikan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ariyanti (Pendamping PKH kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 11 Agustus 2020.

¹⁰¹ Wawancara dengan Kaidah (Keluarga Penerima Manfaat PKH) pada tanggal 15 Agustus 2020.

pendidikan agar bisa mengubah nasib keluarganya ke depan. Dari kutipan dari kepala desa Sebatang bapak Radimin, “memang yang saya lihat mendapatkan Program PKH ini dilihat dari pendidikan orang tuanya”.¹⁰²

Pada saat ini yang sebagai sasaran untuk data awal adalah dari desa dan desa yang semua yang mengupdate data miskin, karena yang tahu semuanya adalah desa sendiri. Memang kalau kita lihat yang paling efektif adalah desa karena kepala desa mengetahui lebih detail di dalam masyarakat.. Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH ibu Ariyanti:

*“memang yang mengupdate data desa, tapi untuk saat ini hanya beberapa desa yang mengupdate, kenapa desa yang mengupdate? karena memang kepala desa yang tahu lebih dalam keadaan masyarakat, makanya desa peran desa sangatlah perlu dalam program ini.”*¹⁰³

Memang kalau kita lihat dalam konteks pendataan yang lebih afektif adalah dari desa, mereka lebih tahu keadaan warga lebih detail. Dalam hal ini pemerintahan daerah harus lebih gigih dalam sosialisasi ke desa-desa agar semangat dan lebih terjaga keamanan desa. Dalam wawancara kepala desa pertampakan bapak salman yaitu:

*“penerapan masalah data kepala desa yang mengupdate data, saya sangat setuju, saya pilih mana yang miskin yang berhak saya data dan warga saya yang mendapatkan manfaat program PKH dan sudah mampu saya keluarkan, pernah sudah saya ajukan tapi sampai saat ini belum diindahkan oleh pemerintahan daerah.”*¹⁰⁴

¹⁰² Wawancara dengan Radimin (Kepala Desa Sebatang) pada tanggal 12 Agustus 2020.

¹⁰³ Wawancara dengan Ariyanti (Pendamping PKH Kecamatan Gunung Meriah) pada tanggal 11 Agustus 2020

¹⁰⁴ Wawancara dengan Salman (Kepala Desa Pertampakan) pada tanggal 12 Agustus 2020.

Program Keluarga harapan ini sangat membantu baik segi ekonomi, kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial. Keluarga yang dapat program PKH ini dapat perhatian pemerintah. Sedangkan yang belum mendapat program PKH ini tentu berbeda, baik di segi pendidikan maupun dengan yang lain. Seperti posyandu bagi yang mendapatkan program PKH ini selalu di tanya kepada ibu-ibu yang sedang hamil ataupun mempunyai anak balita tentu yang belum mendapatkan program ini hanya bisa mandiri.

Berdasarkan penelitian di lapangan yang diteliti penulis bahwasanya data yang sekarang digunakan data lama sehingga yang dapat menerima Program PKH kurang tepat sasaran. Dalam pengimplementasian program PKH karena data yang sekarang masih digunakan data lama sehingga pelaksanaan-pelaksanaan Program PKH tersebut tidak sepenuhnya sempurna dan juga seperti menggraduasi peserta program PKH yang sudah sejahtera belum merata dilakukan oleh pendamping PKH, dan dalam hal ini segera dibenahi dan diperbaiki sesuai dengan harapan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gunung Meriah Mengenai Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sosialisasi pendamping PKH saat ini sudah bagus untuk mengenalkan program PKH untuk menyampaikan kepada peserta PKH. Tapi kepada pengurus desa dengan pendamping PKH masih kurang komunikasi sehingga apa saja kegiatan program PKH para pengurus desa tidak mengetahui.
2. Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam implementasi kegiatan PKH memberikan undangan calon PKH, pertemuan Kelompok, pemutakhiran data, posyandu, dan pencairan dana. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Gunung Meriah saat ini sudah berjalan dengan baik. Partisipasi peserta PKH sangat tinggi baik segi kesehatan, dan pendidikan. Tetapi ada kendala dalam penerapannya seperti data yang digunakan sampai saat ini masih data lama dan kurang tegasnya para pendamping program PKH dalam menggraduasi pada masyarakat yang sudah sejahtera.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah meliputi:

1. Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik para petugas program PKH dengan kepala desa maupun pihak yang terkait dengan program PKH ini, dan jangan saling mengharapkan bekerja untuk masyarakat dengan ikhlas sehingga kemiskinan-kemiskinan yang selalu menghantui bisa diatasi dengan baik, efisien dan efektif.
2. Bagi pemerintahan pusat dan daerah agar segera membuat sistem data kemiskinan yang sinkron dan selalu memperbaharui data sehingga implementasi yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Andi Mappiare , *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.
- Bukhari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dewi Rahayu Kusuma, *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universitas Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Evi Fitrah, *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan”* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2010.
- Farid Hamid & Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

- H.A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*, Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Imran Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, Surabaya: Alfian Primatama, 2011.
- Irawan & Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pembangunan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- J Dwi Narwoko Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Group, 2007.
- Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Joan Hesti Gita Purwasih, Dkk, *Ensiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Djoko Suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia, 2010.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggara Program Keluarga Harapan, 2013*.

Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1988.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2015.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.

Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Miles, Matthew B, "*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/ Matthew B, Miles dan A michael Huberman*" Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Moh. Nazier, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, No. 1 Tahun 2018, *Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Redi Panuju, *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: Komunikasi sebagai Kegiatan Komunikasi sebagai Ilmu*, Jakarta: Kencana, 2018.

Rino Agustianto, *SUJU (Super Jitu) Sosiologi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

- Robinson & Philip, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- S. Aminah & Roikan, *Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Silfia Hanani, *Sosiologi Pendidikan Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukardi, *Metode Penelitian dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Werner J Severin, James W Tankard, *Teori Komunikasi Sejarah Metode dan Terapan dalam Media Massa*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wida Widiati, *Sosiologi I*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Wisnu Indrajit VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Mata Rantai Kemiskinan*, Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Yetty Oktarina, Yudi Abdullah, *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.

B. JURNAL

Anwar, “*Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak*”, Jurnal Al-Ma'iyah, Volume 11 No.1 Januari-Juni 2018.

Dian Herdiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume, Nomor 3; November 2018.

Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No 12.

Muhajir Al-Fairusy, *Kehidupan Sekeruh Air di Ladang Sawit: Kajian Kemiskinan Masyarakat Perbatasan, Kabupaten Aceh Singkil*, Community: Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015.

Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, “ *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan, Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*”, (2013) Vol.16, No. 2.

C. SKRIPSI

Cut Razi Mirsandi, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya*, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Perkembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Ar-Raniry Banda, 2019.

Nurdiana, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mamasan*, Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Perkembangan Masyarakat Islam (PMI), UIN Alauddin, 2017.

Tri Setiana, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Meulaboh-Aceh Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, 2014.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.747/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Status UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020. Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Panitia : Menunjuk Sdr. 1) Ridwan Mahsumad Hasan, Ph. D (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Rusewanti, S. Pd., M. Si (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Ahmad Habibul

NIM/Idarua : 160401063/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Socialcast dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Miskin*

- Kedua :** Kepada Pembimbing yang namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Peninjauan akibat keputusan ini dibebaskan pada saat DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan di dalam Surat Keputusan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Februari 2020 M
27 Jumadil Akhir 1441 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kabag. Kamisan dan Akademi UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
5. Arsip.
Kawatirant
SK berlaku sampai dengan tanggal 30 Februari 2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7537321, Email : uik@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2006/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Sosial Aceh Singkil
2. Camat Gunung Meriah
3. para Kepala Desa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AHMAD HABIBI / 160401063
Semester/Jurusan : VIII / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Tanah Merah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Agustus 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2020

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DINAS SOSIAL

JL. SINGKIL – RIMO KM 14 KETAPANG INDAH – SINGKIL UTARA
Email : dinasos@acehsingkilkab.go.id

SINGKIL

Nomor : 071/43/2020

Singkil, 07 Agustus 2020

Lampiran : -

Hal : PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -

Banda Aceh

1. Sehubungan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B.2006/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal seperti tersebut pada pokok surat.

2. Berkenaan hal tersebut di atas bahwa mahasiswa :

Nama / NIM : AHMAD HABIBI / 160401063
Semester / Jurusan : VIII / Komunikasi Penyiaran Islam
Alamat : Desa Tanah Merah Kec. Gunung Meriah

3. Benar telah mengadakan penelitian di Program Keluarga Harapan dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil mulai tanggal 05 s.d. 07 Agustus 2020 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil".

4. Demikian dan terima kasih.

An. Kepala
Sekretaris,

ROHANA, SE
Pembina/19720727 199403 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL KECAMATAN GUNUNG MERIAH

JALAN CUT MEUTIA NO. 2 RIMO KABUPATEN ACEH SINGKIL

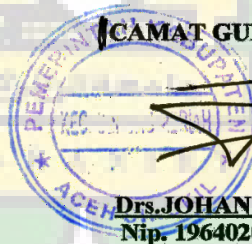
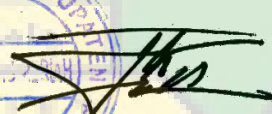
Rimo, 06 Agustus 2020

Nomor : 420/ 416 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di -
Banda Aceh

1. Menindaklanjuti surat Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor :B-2006/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Maka dalam hal ini kami memberi izin penelitian kepada mahasiswa:

Nama : Ahmad Habibi
Nim : 160401063
Fakultas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Aceh Singkil,Kecamatan Gunung Meriah dan Para Kepala Desa
3. Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya dan apabila sudah selesai agar melapor kembali pada Camat Gunung Meriah.


CAMAT GUNUNG MERIAH

Drs. JOHAN PAHMI SANIP
Nip. 19640204 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPUNG TANAH MERAH**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 389 /SK/TM/GM/AS/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tanah Merah Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD HABIBI
Nim : 160401063
Semester / Jurusan : VIII / Komunikasi Penyiaran Islam
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanah Merah Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil

Benar nama tersebut diatas telah mengadakan Penelitian di Desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mulai tanggal 10 s/d 15 Agustus 2020 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul “ Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-Nya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah, 11 Agustus 2020
Kepala Kampung Tanah Merah


IRWANSYAH, S.Pd.I

Nip. 19800105 201408 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPUNG PERTAMPAKAN**

SURAT KETERANGAN

NOMOR :go/SK/pkt/GM/AS/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pertampakan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD HABIBI
Nim : 160401063
Semester / Jurusan : VIII / Komunikasi Penyiaran Islam
Agama : Islam
Alamat : Desa Pertampakan Kec. Gunung Meriah Kab.
Aceh Singkil

Benar nama tersebut diatas telah mengadakan Penelitian di Desa Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mulai tanggal 10 s/d 15 Agustus 2020 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul “ Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-Nya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pertampakan, 11 Agustus 2020
Kepala Kampung Pertampakan





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPUNG SEBATANG**

SURAT KETERANGAN
NOMOR 34/SK/587/GM/AS/ 12020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sebatang Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD HABIBI
Nim : 160401063
Semester / Jurusan : VIII / Komunikasi Penyiaran Islam
Agama : Islam
Alamat : Desa Sebatang Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil

Benar nama tersebut diatas telah mengadakan Penelitian di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mulai tanggal 10 s/d 15 Agustus 2020 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul “ Sosialisasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-Nya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebatang, 11 Agustus 2020
Kepala Kampung Sebatang

RADIMIN

DOKUMENTASI



Poto 1. Wawancara bersama Kepala Bidang Lindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh singkil



Poto 2. Wawancara bersama Camat Gunung Meriah



Poto 3. Wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah



Poto 4. Wawancara bersama Koordinator Program PKH Kabupaten Aceh Singkil



Poto 5. Wawancara bersama Pendamping Program PKH Kecamatan Gunung Meriah



Poto 6. Wawancara bersama Pendamping Program PKH Kecamatan Gunung Meriah



Poto 7. Wawancara bersama Kepala Desa Tanah Merah



Poto 8. Wawancara bersama Kepala Desa Sebatang



Poto 9. Wawancara bersama Kepala Desa Pertampakan



Poto 10. Wawancara Bersama Masyarakat yang digraduasi dari Penerima Program PKH



Poto 11. Wawancara bersama Masyarakat yang digraduasi dari Penerima Program PKH



Poto 12. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH



Poto 13. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH



Poto 14. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH



Poto 15. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH



Poto 16. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH



Poto 17. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH



Poto 18. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH



Poto 19. Sosialisasi Pendamping Program PKH kepada peserta PKH



Poto 20. Sosialisasi Pendamping Program PKH kepada peserta PK



Poto 21. Pemutakhiran Data peserta PKH oleh Pendamping PKH



Poto 22. Pelaksanaan Posiandu peserta PKH



Poto 23. Sosialisasi peserta PKH